

**OPTIMALISASI MODAL POLITIK
PASANGAN ISMET AMZIS-HARMA ZALDI
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010**

Executive Summary

Oleh:

YOVALDRI RIKI PUTRA

07193038



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak Indonesia memasuki era reformasi, maka semenjak itu dalam proses yang berkelanjutan lahirlah otonomi daerah di Indonesia, dengan berbagai perkembangannya seperti yang dirasakan saat ini. Salah satu yang paling menonjol adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai wujud kedaulatan rakyat sampai ke tingkat lokal.

Kesempatan untuk ikut menentukan pilihan pada pemilu terbuka luas bagi seluruh warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat 1, mengatakan : “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”¹.

Dalam momen Pemilihan Umum masyarakat tidak hanya mempunyai hak memilih, namun juga mempunyai hak untuk dipilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, untuk menjadi yang dipilih dalam pemerintahan, terbuka luas bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Dalam sebuah negara yang demokratis, termasuk di dalamnya negara Republik Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan sebuah keniscayaan. Artinya dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, hak memilih dan dipilih harus dijamin pemenuhan akan hak tersebut.

¹ Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang : Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Indonesia, sistem Pemilihan Umum dilakukan secara langsung. Artinya pemilih tidak lagi hanya memilih partai politik pilihan mereka pada pemilihan umum, melainkan dapat langsung menentukan calon pilihan mereka. Baik calon untuk legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota) maupun calon untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati).

Semakin kita sadari bahwa wajah demokrasi di Indonesia dipenuhi oleh semangat dan gairah persaingan². Besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak, pemilukada (Gubernur dan walikota/Bupati), dan pemilihan presiden secara langsung semakin menegaskan era persaingan terbuka dalam demokrasi di Indonesia. Ditengah-tengah persaingan politik yang semakin intens, kehadiran modal politik menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pihak yang memiliki modal politik relatif besar dibandingkan dengan pesaingnya akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, pihak yang memiliki modal politik jauh lebih kecil akan kesulitan untuk bisa bersaing apalagi memenangkan kompetisi politik.

Bulan Juli tahun 2010 yang lalu merupakan musim Pemilihan Umum Kepala Daerah di Sumatera Barat. Satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 14 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota/ Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara serentak. Salah satu pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan oleh Kota Bukittinggi. Dalam pesta demokrasi di kota wisata tersebut muncul 5 pasang calon yang berkompetisi, yaitu, pasangan Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher, Ismet Amzis-Harma Zaldi, Zulkirwan Riva'i-Baharyadi, Nursyamsi Nurlan-Yalvema Miaz dan Darlis Ilyas-Shabirin Rahmat.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bukittinggi Tahun 2010 tersebut, muncul sebagai pemenang adalah pasangan Ismet Amzis dan Harma Zaldi dengan perolehan suara sebanyak 18.011 suara (42,66%), diantara perolehan suara pasangan calon lainnya yaitu, Pasangan Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher sebanyak 10.888 suara (25,79 %), pasangan Zulkirwan Riva'i- Baharyadi sebanyak

² Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal. XXXVII

9.208 suara (21,81%), pasangan Nursyamsi Nurlan-Yalvema Miaz sebanyak 3.044 (7,21%) dan pasangan Darlis Ilyas-Shabirin Rachmat 1.064 suara (2,52%)³.

Sebagai pasangan calon yang menang dalam Pemilu tersebut, menarik untuk dilihat modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi diantara beberapa calon yang memiliki kekuatan modal ekonomi (uang) yang besar dari pasangan calon Ismet Amzis-Harma Zaldi, sebagaimana perbandingannya kita lihat dalam data. (Lihat Lampiran 1). Dari data terlampir tentang harta kekayaan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa, Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi mampu mengalahkan pasangan calon lainnya yang mempunyai harta kekayaan yang lebih besar dari pada pasangan calon Ismet Amzis-Harma Zaldi, kecuali dengan pasangan Darlis Ilyas-Shabirin Rahmat⁴. Total kekayaan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi rendah secara signifikan dari pasangan Ramlan Nurmatias-Azwar Risman Taher yang perolehan suaranya dibawah Ismet Amzis-Harma Zaldi. Dan juga, pasangan Zulkirwan Riva'i-Baharyadi lebih besar lagi kekuatan finansial pasangan ini dari pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, yang mana pasangan ini menempati urutan ketiga perolehan suara.

Melihat harta kekayaan calon sebagai landasan untuk melihat modal ekonomi (uang) calon sangat penting. Karena dalam fenomena pemilihan umum secara langsung, pentingnya modal uang tidak terbantahkan lagi. Faktor pembiayaan merupakan faktor kritical untuk sukses sebuah kampanye⁵. Pembiayaan sosialisasi politik oleh kandidat dalam sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk beberapa item seperti pengadaan baliho, spanduk, mobilisasi kampanye, iklan politik, aksi sosial, bahkan sewa konsultan politik, keseluruhan indikator diatas penting agar kandidat menjadi dikenal oleh pemilih.

³ Data Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Bukittinggi.

⁴ Karena Darlis Ilyas merupakan calon yang sebelumnya merupakan walikota Payakumbuh yang di *impeachment* oleh DPRD Kota Payakumbuh, artinya mempunyai track record politik yang buruk.

⁵ Adnan Nursal. 2004. *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu. Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : Gramedia Pusataka Utama. Hal : 298.

Selanjutnya dari segi *track record* politik dan pemerintahan para pasangan calon, keseluruhan pasangan calon Walikota Bukittinggi Tahun 2010 merupakan wajah-wajah yang tidak asing lagi dalam dunia politik dan pemerintahan lokal Kota Bukittinggi. Seperti tertuang dalam data (Lihat Lampiran 2). Ismet Amzis bukanlah kandidat yang mendominasi jika kita lakukan identifikasi terhadap *track record* politik dan pemerintahan, sekalipun ia punya pengalaman yang banyak dalam politik dan pemerintahan. Nursyamsi Nurlan adalah kandidat bisa dikategorikan sebagai yang mendominasi dalam pengalaman politik dan pemerintahan, terutama dalam politik. Nursyamsi Nurlan adalah politisi yang telah menjabat sebagai pengurus DPP PBB, dan pernah duduk sebagai ketua Fraksi BPD MPR-RI periode 2004-2005. Dua kandidat yang berurutan dibawah Ismet Amzis perolehan suaranya pun bukan tokoh politik baru, Ramlan Nurmatias adalah mantan Ketua KPUD Kota Bukittinggi pada pemilukada tahun 2004, dan membuat gebrakan pada masa jabatannya itu dengan mengembalikan dana sisa anggaran KPUD Kota Bukittinggi sebanyak lebih kurang 700 juta rupiah kepada Negara. Sedangkan Zulkirwan Riva'i merupakan rival pasangan Djufri-Ismet Amzis pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2004, Zulkirwan Riva'I yang lebih dikenal dengan panggilan haji buyuang ini pada waktu itu posisi kedua dalam perolehan suara, dan ia juga pernah menjabat sebagai ketua dewan Penasehat Partai Golkar Kodya Tanggerang.

Dilihat dari perspektif budaya, kedekatan para calon walikota Bukittinggi Tahun 2010 dengan budaya tidak ada yang mendominasi. Image "*urang kurai*" sama-sama melekat pada keluarga masing-masing calon walikota. Sebutan "*urang kurai*" menandakan sebagai keluarga yang berketurunan asli Bukittinggi. Namun menjadi ketertarikan bagi penulis, melihat pengalaman secara budaya yang dimiliki oleh Ramlan Nurmatias dan Zulkirwan Riva'i. Ramlan Nurmatias yang bergelar Datuak nan Basa, merupakan gelar datuk yang diberikan kaum suku Sikumbang asli kurai. Gelar datuk yang dimiliki oleh Ramlan Nurmatias menjadikannya memiliki akses untuk melakukan transformasi budaya dilingkungannya, dan Kota Bukittinggi pada umumnya. Begitu juga dengan Zulkirwan Riva'i, dengan pengalaman pernah menjadi ketua LKAAM, maka Zulkirwan Riva'i juga mempunyai pengalaman atas akses untuk transformasi budaya di Kota Bukittinggi. Menariknya lagi dari

Zulkirwan Riva'i adalah, ia juga , mempunyai akses tranformasi budaya di daerah perantauan, terlihat dari beberapa pengalamannya dalam beberapa organisasi budaya dan ikatan Minangkabau seperti (Pembina PASTI MinangKabau, Penyantun GEBU Minang, dan Dewan Penasehat Saudagar Minang), untuk diketahui organisasi GEBU Minang dan Saudagar Minang merupakan organisasi perantau minang yang saat ini tumbuh besar.

Pengalaman-pengalaman yang berhaluan kepada peningkatan kualitas manusia masing-masing calon Walikota Kota Bukittinggi tahun 2010 tidak ada yang mendominasi, termasuk Ismet Amzis sendiri sebagai pemenang, kecuali kalau kita melakukan identifikasi dari segi latar belakang pendidikan. Nur Syamsi Nurlan merupakan calon Walikota Bukittinggi yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai pada tingkat akademis doktoral (S3), sedangkan Ismet Amzis, Ramlan Nurmatias, dan Darlis Ilyas lulusan sarjana (S1), dan Zulkirwan Riva'i lulusan Akademi Angkutan Udara Trisakti. Pengalaman organisasi juga merupakan akses peningkatan kualitas manusia. Para calon Walikota Bukittinggi keseluruhan merupakan para organisatoris yang berpengalaman. (lihat lampiran2)

Harma Zaldi yang menjadi pasangan Ismet Amzis sebagai Wakil Walikota, dari segi *track record* dalam politik dan pemerintahan, tidak mempunyai rekaman yang berarti. Bahkan lebih unggul beberapa calon Wakil Walikota dari pasangan lainnya. (Lihat Lampiran 3). Dari data terlampir tentang *Track Record* Calon Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010, terlihat bahwa, Harma Zaldi sebagai calon Wakil Walikota dari Ismet Amzis, dari segi *track record* dalam politik dan pemerintahan tidak sebanding dengan *track record* yang dimiliki Azwar Risman Taher sebagai calon Wakil Walikota dari Ramlan Nurmatias, Baharyadi sebagai calon Wakil Walikota dari Zulkirwan Riva'i, dan Yalvema Miaz sebagai calon Wakil Walikota dari Nursyamsi Nurlan. *Track record* menjadi perhatian penting karena dari sanalah dasar pemilih dapat menjatuhkan pilihan terhadap kandidat. Apalagi seorang kandidat yang baru muncul dalam konstelasi PemiluKada seperti Harma Zaldi, dan para calon wakil walikota lainnya-yang keseluruhannya adalah kontestan baru.

Pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih (*voting behaviour*) menjadi argumentasi penulis melihat permasalahan diatas. Kecenderungan pemilih adalah memperhatikan kedudukan kontestan pemilu dalam masyarakat dalam membangun sikap, persepsi dan orientasi politik. Studi Liddle dan Mujani⁶ menyimpulkan faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Sedangkan dari data terlampir bisa ditarik kesimpulan bahwa Harma Zaldi kalau dilihat dari pengalamannya masih ketinggalan ketokohnya dari calon wakil walikota lainnya. Selanjutnya Weber mengatakan, salah satu sumber legitimasi adalah hal-hal yang bersifat rasional⁷. Dalam hal ini *track record, background*, prestasi dan semua kinerja positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bisa menjadi modal sosial bagi politisi.

Status *incumbent* dari Ismet Amzis juga penulis identifikasi, yang sebelumnya menjabat sebagai walikota Bukittinggi setelah kursi walikota ditinggalkan oleh Djufri karena terpilih menjadi anggota DPR RI. Banyak pengamat melihat *incumbent* mempunyai peluang yang besar untuk menang dalam pemilihan umum, karena dari segi popularitas, *incumbent* tentunya lebih unggul dari calon yang *non-incumbent*. Namun Lingkaran Survei Indonesia menyimpulkan bahwa ternyata popularitas yang tinggi cenderung tidak diikuti pula dengan tingkat keterpilihan yang tinggi pula. Dari kesimpulannya Lingkaran Survei Indonesia menyatakan popularitas hanyalah potensi yang perlu diolah oleh *incumbent*⁸. Potensi yang perlu diolah yang dimaksudkan oleh Lingkaran Survei Indonesia tentunya melalui proses kampanye pemilu oleh pasangan calon.

Dari status *incumbent* Ismet Amzis ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dinamika *incumbent* Ismet Amzis berbeda dari *incumbent* kepala daerah yang ingin melanjutkan kepemimpinannya (contoh paling dekat dengan *incumbent* Djufri pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2005). Maka bisa dikategorikan pengaruh Ismet Amzis sebagai *incumbent* wakil kepala daerah masih kuat daripada

⁶ Saiful Mujani and William R Liddle 2010. Personalities, Parties and Voters. *Journal of Democracy* Volume 21, number 2 april 2010. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

⁷ Ibid, Hal : LVII

⁸ Lingkaran Survei Indonesia. Edisi 02 Juni 2007. *Incumbent dan Pilkada*. Hal. 19.

incumbent kepala daerah, ditambah lamanya Ismet Amzis menjabat sebagai walikota pasca ditinggalkan oleh Djufri yang hanya kurang dari 1 tahun.

Dinamika *incumbent* kepala daerah dengan *incumbent* wakil kepala daerah sangat berbeda. Berbedanya dalam hal peluang memenangkan pemilihan umum. Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Lingkaran Survei Indonesia sepanjang pilkada yang berlangsung di Indonesia pada tahun 2005-2006, bahwa dari keseluruhan *incumbent* wakil kepala daerah yang ikut pilkada di Indonesia, hanya 25,87 % yang mampu memenangkan pilkada. Sedangkan *incumbent* kepala daerah dari keseluruhannya yang ikut pilkada di Indonesia, 62,17 % berhasil memenangkan pilkada⁹. Sebagai pembanding untuk dapat lebih mempertajam data di atas, kita lihat majunya *incumbent* yang sama dinamikanya dengan Ismet Amzis, yaitu calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 Marlis Rahman, yang juga di angkat sebagai Gubernur Sumatera Barat setelah kursi Gubernur di tinggalkan Gamawan Fauzi karena ditunjuk sebagai Menteri Dalam negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Namun Marlis Rahman yang berpasangan dengan Aristo Munandar kalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2010. Maka dapatlah kita memahami kesimpulan dari Lingkaran Survei Indonesia di atas tadi dengan argumen bahwa *incumbent* seperti Marlis Rahman berbeda pengaruhnya dengan *incumbent* kepala daerah lainnya, dan khususnya juga sama halnya dengan Ismet Amzis, tetapi Ismet Amzis bisa memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pengalaman 5 tahun menjabat sebagai wakil walikota Bukittinggi pun tercederai, ketika beberapa orang yang berada dilingkaran kekuasaan Djufri dan Ismet Amzis terlibat kasus korupsi, termasuk Djufri sendiri dan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi pada waktu itu Khairul telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus ini tentunya berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap Ismet Amzis dan Partai Demokrat di Kota Bukittinggi, konkritnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Ismet Amzis yang maju sebagai *incumbent*.

⁹ *Ibid.* Hal 4-12

Kasus korupsi atas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD di daerah Manggih Ganting dan korupsi pembangunan pool mobil untuk Dinas Pertamanan Kota Bukittinggi sangat menjadi perhatian masyarakat Kota Bukittinggi, terutama pada masa-masa Pemilihan Legislatif diikuti juga pada masa-masa Pemilukada di kota Bukittinggi. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2007, dan ditentang oleh sebuah LSM yang bernama ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi) bersama masyarakat Manggis Ganting yang ikut membebaskan tanahnya. Djufri beserta beberapa bawahannya terbukti melakukan *mark-up* pembelian tanah masyarakat Manggis Ganting.

Sekalipun pada masa-masa terungkapnya kasus korupsi tersebut tidak melibatkan nama Ismet Amzis, namun sudah bisa dipastikan periode pemerintahan Djufri-Ismet Amzis telah tercederai dengan terungkapnya kasus korupsi ini, terutama pada masa-masa menjelang dilaksanakannya Pemilukada di Kota Bukittinggi. Dampak secara langsung terhadap Ismet Amzis adalah pengaruh *incumbent*-nya menjadi turun, terutama masalah kepercayaan di mata masyarakat, apalagi masalah korupsi telah menjadi perhatian yang serius di tengah masyarakat, ditambah lagi dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, kasus korupsi yang melibatkan Djufri dan beberapa pejabat teras Pemerintah kota Bukittinggi lainnya adalah kasus korupsi yang pertama melibatkan kepala daerah di kota wisata tersebut.

Kasus korupsi tersebut murni berada pada lingkaran eksekutif pemerintahan Kota Bukittinggi. Walikota, Sekda, Asisten 1, Camat Manggih Ganting, Lurah, kabag pemerintahan, merupakan jabatan dilingkungan eksekutif. Maka tidak mungkin seorang Ismet Amzis yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Walikota tidak mengetahui segala tindak-tanduk yang menjurus pada kebijakan yang korup. Apalagi berdasarkan UU No 32. Tahun 2004, salah satu fungsi seorang wakil walikota adalah pengawasan terhadap aparatur pemerintahan. Terjadinya korupsi tersebut, menjadikan kredibilitas Ismet Amzis dalam melaksanakan tugasnya menjadi tercoreng, dan integritasnya secara moral juga ikut tercoreng.

B. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini, yang menjadi batasan ruang lingkup adalah :

Dengan berbagai modal politik yang dimiliki masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2010 yang telah penulis identifikasi, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa modal yang tidak didominasi oleh pasangan Ismet Amzis dan Harma Zaldi namun didominasi oleh pasangan calon lain, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal manusia (dimana latar pendidikan didominasi oleh Nur Syamsi Nurlan) ditambah dengan track record politik dan pemerintahan yang tidak dimiliki oleh calon Wakil walikota dari Ismet Amzis yaitu Harma Zaldi, ditengah-tengah calon Wakil Walikota lainnya adalah pamong senior (birokrat senior) di Kota Bukittinggi. Terhadap status *incumbent* yang dimiliki Ismet Amzis, penulis berkesimpulan tidak terlalu berpengaruh seperti halnya status *incumbent* yang lainnya, dikarenakan pengaruh status sebagai *incumbent* wakil kepala daerah masih besar dari pada status sebagai *incumbent* kepala daerah. Apalagi, dengan mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan mantan walikota Bukittinggi Djufri dan beberapa pejabat penting Kota Bukittinggi, yang pada masa itu Ismet amzis menjabat sebagai wakil walikota, berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap Ismet Amzis yang maju lagi sebagai calon walikota pada pemilukada Kota Bukittinggi Tahun 2010. Maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi melakukan optimalisasi modal politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bukittinggi Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi tahun 2010.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Modal Politik Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Kota Bukittinggi diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi modal politik pada literatur Ilmu Politik. Khususnya dalam menganalisis fenomena dalam perwakilan politik mengenai *candidacy*. Banyak ilmuwan telah menganalisis kemenangan kandidat dengan konsep strategi politik ataupun dengan konsep marketing politik. Namun menurut penulis, konsep modal politik yang seharusnya perlu diperhatikan sebelum memulainya dengan strategi politik ataupun marketing politik, karena ketika kita berbicara marketing politik, maka kandidat sudah dianalogikan sebagai sebuah produk dalam perspektif ekonomi. Maka analogi ekonomi tersebut sudah menggambarkan sebuah kegiatan produksi dalam politik. Darisanalah kita memahami bahwa modal politik sebagai awal dimulainya proses produksi perlu diperhatikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian itu sendiri, selain itu juga diharapkan bisa dijadikan referensi praktis oleh para politisi dalam melakukan optimalisasi modal politik untuk memenangkan pertarungan politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan modal politik pernah dilakukan oleh John A. Booth dan Patricia Bayer Richard dengan judul *Civil Society, Political Capital, and Democratization In Central America*¹⁰.

Booth dan Richard melakukan analisis untuk melihat bagaimana efek dari *civil society*, modal sosial dan modal politik pada level demokrasi di Amerika Tengah. Penelitian yang mereka lakukan merupakan kontribusi kritis terhadap teoritisasi Robert Putnam yang mengatakan bahwa *civil society*-aktivitas masyarakat dalam organisasi, berkontribusi menyukseskan pemerintahan dan demokrasi, yang mana bagi Booth dan Richard memungkinkan pentingnya untuk rekonstruksi perdamaian Amerika Tengah. Tetapi Robert Putnam tidak menjelaskan secara spesifik dan detail bagaimana *civil society* mempengaruhi performa pemerintahan.

Pertama-tama Booth dan Richard menyelidiki hubungan antara dua ukuran *civil society* (aktifitas kelompok formal dan aktifitas komunitas membantu), modal sosial, dan modal politik dengan memanfaatkan survei atas data dari 6 negara Amerika Tengah. Booth dan Richard, dalam penelitian mereka tersebut menemukan tingginya level keanggotaan kelompok formal dan beberapa ukuran modal politik berhubungan dengan tingkat/level demokrasi.

Selanjutnya juga ada penelitian yang dilakukan oleh Regina Birner dan Heidi Wittmer dengan judul *Coverting Social Capital into Political Capital. How do local*

¹⁰ John A Booth and Richard Patricia Bayer 1997. *Civil Society, Political Capital, and Democratization In Central America*. Prepared for presentation at the XXO International Congress of the Latin American Studies Association, Guadalajara, Mexico.

*communities gain political influence? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia*¹¹.

Regina Birner dan Heidi Wittmer berusaha menjadikan konsep modal politik memungkinkan untuk meneliti bagaimana masyarakat lokal menggunakan modal sosial untuk mencapai sasaran hasil politik. Digambarkan dengan teori sumber daya politik yang membedakan antara instrumental dan struktur modal politik. Instrumental didefinisikan atas perspektif aktor, sumber daya aktor dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dan realisasi *outcome* kepentingan mereka. Dan struktur modal politik dilihat berdasarkan pada perspektif publik mengacu pada variabel sistem politik, dimana aktor memungkinkan untuk mengakumulasi modal politik dan menggunakannya secara efektif.

Studi transformasi modal ini diintegrasikan dengan konsep modal sosialnya Pierre Bourdieu yang sedikit banyaknya telah terlupakan untuk dapat mempelajari kepemilikan bersama dan manajemen sumber daya alam. Studi kasus pertama adalah Thailand, di mana di Thailand terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan kepentingan mereka untuk tetap tinggal di dalam hutan yang dikelola oleh pemerintah dan kelompok konservasionis yang tidak setuju dengan keinginan masyarakat lokal tersebut semenjak Departemen kehutanan Thailand mengajukan draft *Community Forestry Bill* (CFB) yang diantaranya mengatur keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Hasilnya, masyarakat lokal mampu mempengaruhi proses politik baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional dengan cara memanfaatkan modal sosial yang telah mereka miliki untuk mendukung upaya-upaya politik.

Studi kasus keduanya adalah Buruh Pedesaan di industri minyak Kolombia. Kasus Kolombia dipilih untuk menggambarkan penerapan kerangka modal politik dalam konteks politik mikro. Kasus ini berhubungan dengan buruh pedesaan dan industri minyak di Casanare, Kolombia. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi

¹¹ Regina Birner and Heidi Wittmer. *Covertng Social Capital into Political Capital. How do local communities gain political influence? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia*. Paper submitted to the 8th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP).

fokus di sini bukan pada kebijakan negara, tapi pada kebijakan perusahaan multinasional dalam yang berhubungan dengan populasi lokal.

Selanjutnya, yang menjadi perbedaan kedua penelitian mengenai modal politik diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, berbeda dari segi metode, sasaran atau penekanan. Metode penelitian yang dilakukan oleh Booth dan Richard adalah menggunakan data survei atau bersifat kuantitatif, sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai modal politik menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Dan, kedua penelitian diatas, sasaran atau boleh disebut dengan penekanannya lebih kepada makro-politik, yang membahas politik dalam konteks umum, seperti masalah demokrasi (penelitian Booth dan Richard) dan masalah ekonomi politik (penelitian Regina Birner dan Heidi Witmer). Berbeda dengan keduanya, penulis akan melakukan penelitian dengan konsep modal politik dengan penekanan pada konteks mikro-politik yang berkenaan proses yang spesifik menunjang dari sistem politik (demokrasi) yaitu pemilu, yang di dalam proses pemilu itu sendiri juga ada proses kampanye atau pun usaha memenangkan pemilu.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 : Perbandingan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian

No.	Judul Penelitian	Metode penelitian	Penekanan/sasaran
1	<i>Civil Society, Political Capital, and Democratization in Central America</i> , Oleh : Booth, John A dan Richard, Patricia Bayer.	Kuantitatif	Makro-politik
2	<i>Coverting Social Capital into Political Capital. How do local communities gain political influence? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia</i> . Oleh : Birner, Regina and Wittmer, Heidi.		Makro-politik
3	<i>Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun</i>	Kualitatif Studi Kasus	Mikro-politik

	2010. Oleh : Yovaldri Riki Putra		
--	-------------------------------------	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

B. Kerangka Teoritis

1. Modal Politik

Kimberly L. Casey dalam “*Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory*”¹², berusaha memberikan definisi terhadap modal politik. Modal politik Casey dikaitkan dengan berbagai interpretasi. Casey mendefinisikan modal politik dengan menggabungkan berbagai definisi modal yang telah ada untuk membentuk definisi empiris yang berbasis modal politik dan proses yang terkait. Interpretasi modal yang sangat mempengaruhinya adalah berasal dari sosiolog Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu berusaha memetaforakan modal yang terkait dengan dengan teori ekonomi (material) kepada non-ekonomi (pengejaran simbolik atau non-materi).

Bourdieu mendefinisikan modal sebagai, modal akumulasi tenaga kerja (dalam bentuk yang terwujud atau itu dimasukkan, diwujudkan, bentuk) yang, ketika dialokasikan atas dasar, pribadi eksklusif, oleh agen atau kelompok agen memungkinkan untuk energi sosial yang tepat dalam bentuk kerja reifikasi atau hidup¹³. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang- baik material maupun simbol, tanpa perbedaan- yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu¹⁴.

Bourdieu mengakui empat bentuk primer jenis modal¹⁵:

¹² Kimberly L Casey.2008. *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory*. Paper Presented at the Illinois State University Conference for Students of Political Science. University of Missouri-St. Louis

¹³ Pierre Bourdieu and Loic J.D Wacqui. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Polity Press. The University of Chicago. Hal. 118.

¹⁴ Bagus Takwin. 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu)*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm 16.

¹⁵ *Ibid*, Hal 119.

1. Modal ekonomi (uang dan harta),
2. Modal budaya (budaya barang dan jasa, termasuk mandat pendidikan).

Modal budaya dapat mencakup rentangan luas property, seni, pendidikan dan bentuk-bentuk bahasa.

3. Modal sosial (kenalan dan jaringan).

Modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau virtual, yang diperoleh dengan individu atau kelompok berdasarkan tahan lama memiliki jaringan atau hubungan dilembagakan lebih atau kurang dari kenalan bersama dan pengakuan.

4. Modal simbolik (legitimasi).

Modal simbolik adalah suatu bentuk modal ekonomi fisik yang telah mengalami transformasi dan, karenanya, telah tersamarkan-menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, dan hanya sepanjang, menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk modal 'material' yang adalah, pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga¹⁶. Bagi Bourdieu bentuk-bentuk simbolik, seperti bahasa, kode-kode pakaian, dan postur tubuh, merupakan hal penting, bukan hanya untuk memahami fungsi kognitif simbol-simbol, melainkan juga untuk melihat fungsi sosial simbol-simbol. Sistem- sistem simbolik merupakan instrument pengetahuan dan dominasi, yang memungkinkan terjadinya sebuah konsensus didalam suatu komunitas yang terkait dengan signifikansi dunia sosial.

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis-jenis modal lainnya- yang artinya modal bersifat "dapat ditukar". Pertukaran yang paling hebat telah dibuat oleh penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah bentuk-bentuk modal yang berbeda dikenali dan dipersepsi sebagai sesuatu yang legitimit. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus atau prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimit. Artinya, Bourdieu menekankan untuk menjadi aktor yang terlegitimit itu diperoleh dari modal simbolik, selanjutnya pada gilirannya memberi para individu suatu identitas dikenal dan diakui, yang selanjutnya dihadaahi dengan modal budaya dan modal ekonomi.

¹⁶ Bagus. Op.cit, Hlm 6.

Menurut Casey, konseptualisasi modal Bourdieu di atas dapat diaktualisasikan dan diperluas kedalam bentuk kekuasaan. Casey mendefinisi modal politik, adalah jumlah dari kombinasi jenis lain modal untuk tindakan politik atau pengembalian investasi modal politik yang dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi).

Pembentukan modal politik adalah mirip dengan yang di semua proses modal lainnya. Sumber daya Modal yang dikumpulkan melalui tenaga kerja (atau produksi) oleh aktor ke dalam produk. Produksi Istilah di sini dapat diidentifikasi sebagai proses agregasi aktif. Dengan asumsi aktor secara aktif mengejar hasil politik, setelah berbagai sumber daya modal dari berbagai pasar dikumpulkan oleh seorang aktor, mereka menjadi sumber daya politik dan berhenti mempertahankan bentuk mereka masing-masing untuk aplikasi berbasis berakhir untuk pasar lainnya.

Casey mengidentifikasi tujuh jenis modal utama sebagai elemen-elemen terutama untuk penciptaan modal politik¹⁷:

1. Modal kelembagaan,

Hubungan terkuat antara pencalonan dan lembaga-lembaga politik adalah partai politik. Partai politik juga memungkinkan kandidat untuk mendefinisikan posisi kebijakan dan ideologinya, apakah ia mendukung posisi partai atau tidak. Dukungan kandidat untuk posisi partai mungkin memiliki beberapa efek pada dukungan partai untuk calon juga. Serta juga akan berdampak pada pencalonannya oleh dimana partai diposisikan (positif atau negatif) dibandingkan dengan partai lain dalam sebuah pemilu.

2. Modal manusia,

Menurut Lin, modal manusia adalah sumber daya dalam kepemilikan aktor yang bisa membuat keputusan (latihan otoritas) tentang penggunaan mereka dan disposisi¹⁸.

¹⁷ Op.Cit, , Kimberly L. Casey. Hal 11.

Davenport menyatakan bahwa modal manusia adalah "orang-orang membawa uang untuk berinvestasi dalam pekerjaan mereka. Pekerja, bukan organisasi, adalah pemilik modal manusia¹⁹".

Davenport membagi modal manusia kepada ke tiga elemen dasar: kemampuan, perilaku, dan usaha, dikombinasikan dengan waktu, sebagai elemen keempat. Kemampuan didefinisikan terdiri dari tiga komponen: pengetahuan, "perintah dari suatu tubuh fakta yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan," keterampilan, "fasilitas dengan sarana dan metode" kemahiran dalam serangkaian kegiatan atau bentuk-bentuk pekerjaan. " untuk menyelesaikan tugas tertentu; "dan bakat, yang bawaan untuk melakukan tugas tertentu ". Perilaku adalah "diamati cara bertindak yang berkontribusi terhadap pemenuhan tugas".

3. Modal sosial,

Lin mendefinisikan modal sosial diukur dalam tiga cara²⁰. Dukungan kelompok kolektif calon diukur dengan jumlah dukungan kandidat lain menerima. Pengukuran ini juga akan menyertakan dukungan dari individu, dengan asumsi bahwa dukungan individu membawa pada dukungan kolektif, bukan hanya mewakili individu memberikan dukungan tersebut. Pengukuran kedua menunjukkan ikatan pribadi calon-kelompok-kelompok di mana kandidat langsung berpartisipasi di luar partai politik. Kelompok tersebut misalnya, akan kelompok-kelompok sipil lokal, keanggotaan gereja, asosiasi profesional, dan klub. Pengukuran ketiga dari modal sosial adalah pengakuan nama. Pengukuran ini menunjukkan seberapa dikenal calon dalam asosiasi-nya.

¹⁸ Ibid, Hal

¹⁹ Ibid, Hal 11.

²⁰ Ibid, hal 13

4. Modal ekonomi,

Untuk pengukuran tertentu yang disarankan di sini, modal ekonomi diukur semata-mata sebagai kekayaan pribadi, atau lebih tepatnya, potensi bahwa seseorang memiliki finansial untuk berkontribusi pada pencalonan mereka sendiri.

5. Modal Budaya

Pierre Bourdieu mengkonseptualisasikan modal budaya sebagai produk dari praktek sosial dan reproduksi sosial dari simbol tersebut dan makna yang memungkinkan kelas atas untuk melakukan budaya dominan mereka melalui reproduksi siklus (kekerasan simbolik / ideologi)²¹.

6. Modal simbolik

Modal simbolik berkaitan erat dengan modal budaya dan dihasilkan sebagai produk dominasi. Menurut Bourdieu ini melegitimasi dominasi melalui peringkat sosial atau perbedaan, memungkinkan sistem simbol untuk "memenuhi fungsi politik".

7. Modal moral

John Kane, pada tahun 2001 bukunya, *Politik Moral Capital*, menyatakan bahwa modal moral atau "moral prestise-baik dari seorang individu, organisasi, atau penyebab - di layanan yang bermanfaat" terjalin erat dengan politik formal dan perilaku politik²².

Modal moral yang dapat dibedakan dari kekuatan pemaksa dan harus dianggap sebagai independen berfungsi sebagai sumber asli. Mereka yang mencapai modal moral melakukannya dengan apa yang disebut oleh Kane sebagai "landasan moral", atau menetapkan prinsip-prinsip, nilai, dan tujuan yang beresonansi dengan orang lain. Ketika orang lain memutuskan secara hukum baik individu atau lembaga untuk memiliki cukup puas prinsip, nilai-nilai dan tujuan mereka, mereka cenderung untuk

²¹ Ibid, hal 14

²² Ibid, Hal 14

memberikan beberapa kuantum menghormati dan persetujuan kuantum (individu atau institusi) modal moral (Kane 2001,10).

Karakter, bagaimanapun, bukanlah sumber modal moral, menurut Kane. Dia percaya ini adalah "persepsi" dan "penilaian" dari karakter yang dihitung. Jika modal moral adalah hak dalam adjudikasi orang lain, maka modal moral "harus terikat untuk konstituen tertentu" dari Juri "didefinisikan oleh hal-hal seperti kelas, budaya, minat, kebangsaan dan seterusnya". Dengan demikian modal moral, terikat untuk konstituen tertentu adalah "didefinisikan oleh nilai-nilai akhir dan tujuan tertentu-, di mana [modal moral] dibentuk dan dipelihara. Dalam kasus pencalonan, pemilih membentuk Juri yang paling penting dari modal politik untuk model kami, walaupun dalam hal praktis, yang lain, seperti media, dapat menetapkan calon sehingga mempengaruhi persepsi keseluruhan.

Modal moral biasanya merupakan fungsi dari keanggotaan dalam lingkup yang lebih besar entitas kolektif, seperti partai, gerakan, pemerintah, bahkan negara. Kane mengatakan bahwa "entitas ini adalah pembawa modal politik sejauh mereka dianggap untuk mewujudkan prinsip-prinsip, tujuan dan kepentingan percaya mulia, adil, sah dan moral yang diperlukan". Kane yakin bahwa hubungan antara modal moral individu dan modal moral kelembagaan "umumnya timbal balik bagi kedua belah pihak tetapi juga" sebagian "dibagi karena gangguan dalam proses umumnya dialektik.

Menurut Firmanzah, ada dua jenis modal politik²³ :

- Modal Kapital (Uang)

Modal uang digunakan untuk membiayai kampanye. Masing-masing partai/ politisi berusaha untuk meyakinkan publik bahwa partai/politisi tersebut adalah partai/politisi yang lebih peduli, empati, memahami benar persoalan bangsa dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Salurannya adalah melalui media promosi, seperti TV, lobi ke ormas, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik dan pengumpulan massa, semuanya itu membutuhkan dana yang besar .

²³ Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal IV.

- Modal sosial (*Social Capital*)

Berbeda dengan modal capital (uang), dalam modal sosial baik politisi dan partai politik lebih mengedepankan akumulasi dari kredibilitas, popularitas dan jaringan yang terdapat di masyarakat. Modal sosial ini dibangun melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat. Akumulasi modal sosial ini dapat dilakukan baik sebelum dan selama individu terjun dalam dunia politik. Karena legitimasi politik dimiliki ketika seseorang mendapatkan dukungan massif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Popularitas menjadi kata kunci dalam modal sosial untuk mendapatkan pengakuan (*recognition*), perhatian dan ketenaran dalam masyarakat.

Namun tidak hanya itu saja, popularitas harus terlegitimasi. Weber membedakan tiga hal tentang sumber legitimasi :

- Legitimasi yang bersumber pada hal-hal yang bersifat rasional. Dalam hal ini *track record*, *background*, prestasi dan semua kinerja positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bisa menjadi modal sosial bagi politisi. Popularitas yang berasal dari reputasi kerja-rasional menjadi modal sosial untuk bisa meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari publik.
- Sumber legitimasi berikutnya adalah kharisma, nilai, simbol-simbol tradisional yang melekat pada diri seseorang. Bagi masyarakat yang percaya bahwa garis keturunan dan daya-magis seseorang merupakan lahan subur bagi keberadaan legitimasi jenis ini.
- Legitimasi yang berdasarkan penguasaan kepada hal-hal teknis instrumental. Mereka yang diyakini memiliki tingkat pendidikan tinggi, keahlian, dan kemampuan inteligensia bisa menjadi sumber legitimasi di mata masyarakat.

Kacung Maridjan pun tidak ketinggalan membahas konsepsi mengenai modal politik kandidat dalam pemilu. Ia memetaforakan kandidat yang bertarung dalam pemilukada ibarat kendaraan, dimana harus adanya mobil yang baik, sopir yang

piawai dan bensin yang memadai. Dalam metafora tersebut terwujud dalam tiga bentuk modal, yaitu²⁴:

1. Modal Politik

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang ingin mengikuti kontestasi dalam pilkada secara langsung, baik dalam tahap pencalonan²⁵, maupun pada tahap pemilihan.

2. Modal Sosial

Yang dimaksud dengan modal sosial disini adalah bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki pasangan calon dengan masyarakat pemilihnya. Termasuk didalamnya seberapa jauh pasangan calon itu mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka itu mempunyai kompetensi untuk memimpin daerahnya. Agar bisa dipilih, seorang calon harus dikenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa adanya pengenalan. Tetapi keterkenalan atau popularitas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kepercayaan.

3. Modal Ekonomi

Pemilu, termasuk pilkada, jelas membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai kampanye, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membiayai membangun relasi dengan para calon pendukungnya.

Transformasi modal-modal di atas juga dijelaskan dengan konsep sosiolog Pierre Bourdieu, konsep yang paling dikenal dari seorang Bourdieu yaitu *habitus*. *Habitus* adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah

²⁴ Kacung Maridjan. 2007. *Pilkada Langsung : Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*. Disampaikan pada "In-House Discussion Dialog Komunikasi Partai Politik" yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). Jakarta. Hlm. 7.

²⁵ Waktu artikelnya ditulis, pada masa itu masih diberlakukan "*party System*" dimana, setiap kandidat yang ingin maju dalam pilkada harus melalui representasi partai politik. Namun Prof. Kacung Maridjan tetap berargumentasi bahwa sekalipun akan dibuka peluang atas pencalonan perseorangan, tetap saja dukungan partai politik tidak dapat dianggap sepele.

(*durable, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif²⁶. *Habitus* mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal. Disposisi diperoleh dalam berbagai posisi sosial yang berada di dalam suatu *ranah*, dan mengimplikasikan suatu penyesuaian subjektif terhadap posisi itu. *Habitus* diindikasikan sebagai skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda realitas sosial.²⁷, Richard Jenkins juga memberikan penjelasan mengenai pemikiran Bourdieau tersebut²⁸ :

“Ini adalah suatu sistem generatif yang didapatkan dan disesuaikan secara objektif dengan kondisi khas dimana dia dibangun”.

Skema itu diungkapkan dalam wujud istilah sebagai hasil penamaan. Skema-skema itu berhubungan sedemikian rupa membentuk struktur koognitif yang memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup kesehariannya bersama orang-orang lain. Penjelasan terakhir ini menjembatani konsep *habitus* ini untuk dimetaforakan kepada kandidat politik. *Habitus* telah didefinisikan sebagai bentuk generalisasi yang haluan akhirnya adalah praktik, generalisasi itu tersusun atas struktur kognitif individu dengan orang-orang lain, artinya secara implisit terdapat mobilisasi kognitif individu-individu yang diakhiri dengan tindakan. Misalnya, “sakit”, merupakan kondisi fisik yang tidak menyenangkan yang dialami manusia, maka tindakan manusia diarahkan kepada menghindarinya, termasuk menghindari orang yang membawa sakit. Terhadap kandidat politik, *habitus* bisa menjelaskan bagaimana menggeneralisasikan kecenderungan kognitif para kandidat atas ranah pemilu, terutama dalam usaha memenangkan pemilu.

Diatas disinggung mengenai “*ranah*”. *Ranah* (field) juga merupakan konsep yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieau. Untuk memahami apa itu *ranah* bisa dengan penjelasan multilevel dari Bagus Takwin tentang relasi *habitus* dengan *ranah*, dengan modal terakhir bagaimana relasi-relasi ini menghasilkan praktik :

²⁶Bagus Takwin. *Op. Cit.* hlm 13.

²⁷ Ibid, xviii

²⁸ , Richard Jenkins. 2004. *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieau*. Kreasi Wacana: Yogyakarta. Hlm. 107.

Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara *habitus* sebagai produk sejarah, dan *ranah* yang juga produk sejarah. Pada saat bersamaan, *habitus* dan *ranah* juga merupakan produk dari medan dari daya-daya yang ada di masyarakat. Dalam suatu *ranah* ada pertarungan kekuatan-kekuatan serta orang yang memiliki *modal* banyak dan orang-orang yang tidak memiliki *modal*. *Modal* merupakan sebuah konsentrasi kekuatan, suatu kekuatan spesifik yang beroperasi didalam *ranah*. Setiap *ranah* menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan didalamnya²⁹.

Agar dapat lebih memahaminya lagi, dicontohkan bagaimana dalam ranah intelektual, seseorang harus memiliki modal istimewa dan spesifik seperti otoritas, prestise dan sebagainya untuk dapat menampilkan tindakan yang dihargai dan membuatnya menjadi individu yang berpengaruh. Selain itu, ia juga harus memiliki *habitus* yang memberinya strategi dan kerangka tingkah laku yang memungkinkannya menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan ranah intelektual.

Ranah merupakan ranah kekuatan yang secara parsial bersifat otonom dan juga merupakan suatu ranah yang didalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi. Posisi-posisi ditentukan oleh pembagian modal khusus untuk aktor yang berlokasi didalam ranah tersebut. Ketika posisi-posisi dicapai, mereka dapat berinteraksi dengan *habitus*, untuk menghasilkan “postur-postur” berbeda yang memiliki suatu efek tersendiri pada ekonomi “pengambilan posisi” didalam ranah tersebut³⁰. Dalam kandidat politik apa yang disebut *ranah* adalah pemilu, aktornya adalah kandidat politik, sedangkan habitusnya adalah (seperti yang sudah dibahas diatas) generalisasi kognitif kandidat pada pemilu, khususnya kecenderungan dalam memenangkan pemilu. Jadi untuk mendapatkan posisi di dalam *ranah* pemilu, aktor semestinya memiliki *modal* sehingga ia bisa disebut sebagai “kandidat” (sebuah sebutan aktor telah memiliki posisi dalam pemilu), sampai kandidat mencapai tahap posisi yang mampu menghasilkan “postur-postur berbeda”-nya. Maksud dari “postur-postur berbeda”-nya dalam pemilu ini adalah bisa dikatakan sebagai pengaruh yang besar,

²⁹ Ibid, Hlm. XX.

³⁰ Ibid, Hlm 10

sehingga mudah untuk mendapatkan kepercayaan di hadapan pemilih. Modal khusus yang harus dimiliki actor didalam ranah pemilu, itulah modal-modal yang dikonsepsikan oleh Kimberly L. Casey, yang telah dipaparkan satu persatu diatas.

Untuk dapat mengkonstruksikan dan mereproduksi posisi-posisi mereka dan memperoleh posisi, maka Bourdieu telah mendeskripsikan dua tipe strategi untuk mempertimbangkan proses ini³¹ :

a. Tipe pertama, strategi reproduksi dilihat sebagai kumpulan praktik yang dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi.

b. Tipe kedua, strategi penukaran (*reconversion*), berkorespondensi dengan pergerakan-pergerakan didalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi ; pertama, dalam hal bahwa keseluruhan jumlah modal adalah terstruktur dan, kedua, lewat perstrukturiran tipe-tipe modal yang dominan dan terdominasi. Artinya, modal-modal yang tidak mendominasi bisa dipertukarkan dengan modal yang dominan, karena modal itu sendiri masing-masing modal dalam satu kejumlahan, pada tipe inilah terjadi optimalisasi modal.

Banyaknya kontribusi ilmuwan dalam paparan konsepsi modal yang diarahkan pada kandidat dalam pemilu menggambarkan bangunan teoritisasi untuk melihat modal politik seorang kandidat. Penulis menyimpulkan bahwa dari paparan konseptual ketiga ilmuwan diatas (Kimberly L. Casey, Firmanzah dan Kacung Marijan) secara implisit berakar dari pemikiran Pierre Bourdieu tentang modal, dan memang secara eksplisit terdapat perbedaan diantara ketiga ilmuwan tersebut, namun penulis melihat perbedaan mereka dari segi penamaan (*labeling*) generalisasi konsep saja, dari segi substansi tidaklah berbeda.

Konsepsi modal politiknya Kimberly L, Casey jelas mengembangkan indikator-indikator modal politik dari konsep modalnya Pierre Bourdieu. Ia membagi menjadi 7 jenis modal yang merupakan turunan dari 4 jenis modal yang dipaparkan Bourdieu. Modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya sama-sama berdiri sendiri antara Casey dan Bourdieu, namun modal lainnya Casey ; modal moral, modal

³¹ Ibid, hlm. 23.

manusia, modal simbolik kecuali modal kelembagaan, merupakan pengembangan dari modal simbolik yang dijelaskan oleh Bourdieu. Modal kelembagaan yang dijelaskan Casey jelaslah sama dengan apa yang disebut oleh Kacung Marijan sebagai modal politik. Sedangkan Firmanzah, sekalipun ia membagi modal politik menjadi modal ekonomi dan modal sosial saja, namun penjelasan lanjutan mengenai modal sosialnya tentang sumber legitimasinya Weber, tersirat juga paparan jenis modal yang dijelaskan Pierre Bourdieu. Itulah alasan penulis berargumen bahwa ketiga ilmuwan tersebut secara implisit berangkat dari konsepsi modalnya Pierre Bourdieu.

Untuk membantu penulis melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi Pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bukittinggi Tahun 2010, maka penulis lebih cenderung untuk memilih paparan dari Kimberly L, Casey, terkait dengan tipologi modal, dikarenakan paparan jenis modal politiknya Casey tersebut mampu melakukan generalisasi secara detail mengenai modal politik, terutama terhadap jenis-jenis modal politik, sehingganya penulis pun akan terbantu dalam menurunkan variabel-variabel penelitian nantinya. Memilih tipologinya Casey, bukanlah suatu bentuk keberpihakan yang tegas, karena pada penjelasan selanjutnya, penulis secara eksplisit menggunakan konsepsi *habitus* dan *ranahnya* Pierre Bourdieau untuk memaparkan bagaimana proses transformasi modal itu berlangsung, di mana ilmuwan lainnya (Kacung Maridjan dan Firmanzah) seperti yang telah penulis jelaskan diatas, juga secara implisit bermuara dari pemikirannya Bourdieau, khususnya terhadap tipologi modal.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

Berdasarkan PP RI No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah³². Kepala daerah dan

³² PP RI No. 6 Tahun 2005

Wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat Kota.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung. Maksud secara langsung disini mengandung pengertian bahwa masyarakat di daerah berhak memilih secara langsung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lolos verifikasi KPUD. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tersebut ditujukan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menganut sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dengan memilih calon berpasangan³³.

Dan sebagai tambahannya, pada tanggal 23 Juli Tahun 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.05/PUU-V/2007, keputusan ini lanjutan revisi dari UU No.32 Tahun 1999 yang merevisi pasal 59 ayat (1), pasal 59 ayat (2), dan pasal 59 ayat (3). Yang mengabdikan pengajuan calon Kepala Daerah independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Calon independen merupakan calon yang berasal dari masyarakat atau calon perseorangan yang mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah tanpa dukungan dari partai politik. Dan azas yang digunakan dalam pilkada masih sama dengan azas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No.12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yaitu azas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, yang menjadi penyelenggara dalam pilkada ditugaskan kepada KPUD di tiap masing-masing daerah³⁴. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan. Namun secara organisatoris KPUD tetap bertanggung jawab kepada KPU Pusat, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003³⁵.

³³, Rozali Abdullah. 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 56.

³⁴ UU No. 12 Tahun 2003.

³⁵ Rozali Abdullah, *Op Cit.* Hal 56.

Dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-III/2005, berkenaan dengan uji materil terhadap beberapa pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa KPUD tidak lagi bertanggung jawab pada DPRD, baik pelaksanaan tugas DPRD-DPRD, maupun bertanggung jawab penggunaan anggaran Pilkada. KPUD selanjutnya bertanggung jawab pada pemerintahan daerah masing-masing. Disamping itu, DPRD tidak lagi berwenang membatalkan pasangan calon yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya kewenangan tersebut beralih kepada KPUD.

Pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Peserta dalam pemilihan Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan berpasangan oleh partai politik, gabungan partai politik ataupun calon dari perseorangan. Partai politik atau koalisi yang dapat mengajukan pasangan calon yang memiliki 15% kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD didaerah bersangkutan³⁶.

³⁶ *Op.Cit*, PP RI No.6 Tahun 2005.

Dari skema pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa, pemikiran penelitian ini berawal dari Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang diterapkan secara langsung telah melahirkan semangat persaingan politik yang sangat intens antar kontestan pemilu. Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi adalah salah satu pasangan calon yang ikut dalam pemilihan Walikota-dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010, dan pasangan ini meraih kemenangan dengan modal politik yang tidak mencolok dari modal politik pasangan calon lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi Pada Pemilukada Kota Bukittinggi Tahun 2010 ini, maka dianalisis dengan konsepsi modal politik yang dipaparkan Kimberly L. Casey, yang mana Casey membagi modal politik itu menjadi tujuh bentuk modal : Modal ekonomi, modal budaya, modal moral, modal manusia, modal kelembagaan, modal sosial, dan modal simbolik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti. Karena pendekatan ini pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³⁷ Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati.³⁸

Terkait dengan rancangan penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Yang dimaksud dengan *studi kasus* adalah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Yin, sebagai berikut³⁹ :

Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang :

- Menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana
- Batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana ;
- Multisumber bukti dimanfaatkan.

Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki dan bilamana focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam

³⁷ S Nasution. 1992. "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*". Bandung : Transiti. Hal : 5S

³⁸ Lexy maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm.134.

³⁹ Robert K Yin.. 2002. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hlm. 1.

kehidupan nyata. Selain itu, penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe penelitian ; eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif.

Alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena pendekatan ini cukup relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, terutama untuk bisa menggali dan mengungkapkan Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma zaldi sehingga mereka berhasil menang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010. Dalam tataran tujuan metodologi, permasalahan penelitian juga menjadi pendukung untuk dipilihnya metode studi kasus dikarenakan permasalahan penelitian ini tersirat mengandung pertanyaan “bagaimana” Optimalisasi Modal Pasangan Ismet Amzis – Harma Zaldi pada Pemilukada Kota Bukittinggi Tahun 2010, yang mana pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan metode kualitatif tipe studi kasus, ditambah lagi fokus penelitian ini adalah tergolong pada fenomena kontemporer. Penjelasan Stoufer juga ikut menjadi pertimbangan penulis untuk memilih studi kasus dalam penelitian ini, diamana Stoufer mengatakan⁴⁰ :

“Seorang peneliti kasus biasanya mencari sesuatu yang umum dan khusus dari sebuah kasus, namun hasil akhirnya sering kali memberikan sesuatu yang unik dan menarik”.

Keunikan tersebut berpeluang menyebar rata hingga mencakup :

1. Ciri khas/ hakikat kasus
2. Latar belakang historisnya
3. Konteks/setting fisik
4. Konteks lain, mencakup ekonomi, politik, hukum dan estetika.
5. Kasus-kasus lain yang dengannya suatu kasus dapat dikenali
6. Para informan yang menjadi sumber dikenalnya kasus.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi dasar argumen penulis memilih metode kualitatif tipe studi kasus dalam penelitian ini, di mana kekhasan kasus kemenangan

⁴⁰ Stoufer. 1941, dalam Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln. 2009. *Handboook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pusatala Pelajar. Hlm. 302.

pasangan Ismet Amzis- Harma Zaldi pada Pemilu Kota Bukittinggi tahun 2010 terletak pada tidak mendominasinya modal politik yang dimiliki pasangan ini diantara pasangan calon lainnya. Ditambah lagi, calon wakil walikota yang diusung oleh kubu Ismet Amzis tidak mempunyai *track record* dalam bidang politik dan pemerintah untuk dapat menumbuhkan kepercayaan pemilih terhadap pasangan ini, ditengah-tengah para calon wakil walikota yang nota bene adalah orang-orang yang mempunyai *track record* yang matang dalam politik dan pemerintahan di Kota Bukittinggi. Dilihat dari latar belakang historisnya, Ismet Amzis yang status *incumbent*-nya masih dominan status *incumbent* wakil kepala daerah, ditambah lagi fenomena kandidat politik yang membutuhkan pendanaan yang besar, semakin memperkuat alasan penulis menjadikan metode penelitian tipe studi kasus untuk menganalisis Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pemilu Kota Bukittinggi Tahun 2010.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi. Hal tersebut dikarenakan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini berada pada daerah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010.

C. Peranan peneliti

Dalam penelitian ini, posisi peneliti berada diluar organisasi tim kampanye Ismet Amzis –Harma Zaldi sehingga peneliti bisa mengolah informasi-informasi hasil wawancara untuk mendeskripsikan modal politik Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010 secara objektif.

D. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja atau *purposive sampling*. *Purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan maksud dan tujuan penelitian⁴¹. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut

⁴¹ Sanapiah Faisal. "Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi". Malang, YA, 1990. Hlm.56.

memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dibutuhkan dalam kaitan terhadap optimalisasi modal politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi dalam memenangkan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010 ini beserta persoalannya.

Dalam kaitan dengan pemilihan informan awal, Spradley mengusulkan lima kriteria dalam menentukannya, yaitu⁴² :

- Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan dan medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.
- Subjek yang masih terlibat penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
- Subjek yang punya cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
- Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan lebih dulu.
- Subjek yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian.

Dalam penelitian ini informan dimulai dari pasangan calon, Ketua tim kampanye, , Koordinator Bidang Pemenangan dan Sosialisasi, ajudan, pengurus LKAAM Kota Bukittinggi, tokoh masyarakat. dan untuk triangulasi data informan penelitian dimulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi), ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi dan KPUD Kota Bukittinggi .

⁴² Burhan Bungin. 2003. *“Analisis Data Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Raja Garfindo Persada. Hal. 54-55

Tabel 3.1 : Nama Informan dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Ismet Amzis	Calon Walikota
2.	Sy. Dt. Palimo	Ketua Tim Sukses
3.	Nasrul M. Pietra	Koordinator Pemenangan Pemilu dan Sosialisasi
4.	Mahendra	Ajudan Ismet Amzis
5.	H. Munir zakaria	Tokoh Masyarakat
6.	HM. Dt. Pandak	Ketua LKAAM Kota Bukittinggi

E. Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu beberapa orang tim kampanye Ismet-Amzis pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010 dan beberapa orang yang intens dalam lingkungan Ismet Amzis dan Harma Zaldi. Pada unit analisis ini, subjek harus individu yang intens berinteraksi dengan Ismet Amzis dan Harma Zaldi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), dimana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan mukda dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti⁴³. Pada awalnya peneliti

⁴³ Mardalis, *metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi aksara, 2006,Hlm.67.

terlebih dahulu menghubungi setiap informan dengan memberikan surat izin penelitian yang diperoleh dari fakultas. Tujuannya adalah memberi tahu maksud dan tujuan peneliti, serta untuk mengetahui tanggapan dan kesediaan masing-masing informan untuk diwawancarai.

b. Studi Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan⁴⁴. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan guna mendukung dan menambah bukti untuk memperoleh informasi yang akurat. Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah arsip-arsip dan berita acara yang diperoleh dari tim kampanye.

G. Uji Pembuktian (Triangulasi) Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan dalam memperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.

⁴⁴ Lexy J Maleong, “ *Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Hlm

Tabel : 3.2 Nama Informan Triangulasi dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Dt. Panghulu Sati	Tokoh Masyarakat/adat
2.	Young Happy	LSM ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi)
3.	Maderizal	Ketua BAPILU DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi
4.	H. MS Angku Kabasaran	Tokoh Agama
5.	Mazdiwar	Anggota KPUD Kota Bukittinggi

H. Analisis Data

Seluruh data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti, dan informasi emik merupakan pandangan dari informan. Hasil wawancara kemudian dipaparkan sebagaimana yang dikatakan oleh informan kemudian dibahas, diinterpretasi, atau dianalisa oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis data studi kasus yang peneliti pilih adalah pembuatan eksplanasi atau deskriptif, dikarenakan, berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010, maka penggunaan strategi analisis

eksplanasi penulis anggap tepat. Analisis eksplanasi akan membantu penulis menganalisis bagaimana proses optimalisasi modal yang dilakukan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, karena optimalisasi itu sendiri menyiratkan sebuah proses dan terstruktur dan kasusnya bersifat tunggal.

Tekni analisis pembuatan eksplanasi bertujuan menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan⁴⁵. Menjelaskan suatu fenomena berarti menerapkan serangkaian keterkaitan timbale balik mengenai fenomena tersebut. Pembuatan eksplanasi sering dilakukan dengan dalam bentuk naratif, dan karena narasi semacam itu tak bisa persis, studi kasus yang baik adalah yang eksplanasinya mencerminkan beberapa proposisi-proposisi yang signifikan secara teoritis.

I. Rancangan Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 6 Bab yaitu :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti telah mendeskripsikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, serta signifikansi penelitian mengenai modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010. Penelitian ini dilatar-belakangi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi-yang setelah diperbandingkan dengan modal politik pasangan calon lainnya, ternyata beberapa modal politik didominasi oleh pasangan calon lain diluar Ismet Amzis-Harma Zaldi. Maka menganalisis bagaimana optimalisasi modal politik yang dilakukan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi menjadi tujuan penelitian ini.

2. Bab II ini mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta mendeskripsikan mengenai konsep yang telah peneliti pakai untuk melihat modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2010. Dua penelitian terdahulu dijelaskan dalam rancangan penelitian ini, yaitu pertama,

⁴⁵ *Op. Cit.* K. Yin, Hal 147.

penelitian yang dilakukan oleh John A. Booth dan Patricia Bayer dengan judul *Civil Society, Political Capital, and Democratization In Central America*, kedua, penelitian Regina Birner dan Heidi Wittmer dengan judul *Converting Social Capital. How do local communities gain political influence? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia*.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang peneliti pakai untuk melakukan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus .

4. Bab IV Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini mendeskripsikan gambaran umum Pemilu kota Bukittinggi tahun 2010 dan profil tentang masing-masing pasangan calon.

5. BAB V Temuan dan Pembahasan

Bab ini mendeskripsikan mengenai permasalahan dalam penelitian dimana peneliti menjelaskan temuan data selama dilapangan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Menjabarkan mulai dari identifikasi 7 modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi yang sesuai dengan konsepsi modal politik Kimberly L. Casey, setelah itu dilanjutkan dengan analisa proses optimalisasi, hingga terakhir mengorganisasikannya dengan konsep habitus Pierre Bourdieu.

6. BAB VI Penutup

Bab ini mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, dimana kesimpulan penelitian ini adalah proses optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilu kota Bukittinggi tahun 2010 dimulai dengan modal manusia dan modal moral yang di miliki oleh pasangan ini, sehingga mengoptimalkan modal simbolik dan modal budaya, dan berdampak kepada teroptimalkannya modal sosial pasangan ini, dan akhirnya mengoptimalkan modal lembaga dan modal ekonomi. Peneliti menekankan dua hal khusus untuk saran dari penelitian ini, yaitu bagi politisi hendaknya harus lebih memperhatikan kepemilikan modal politik yang kompleks ini dari pada cara-cara konvensional yang bergantung kepada keuangan yang banyak, dan untuk akademisi penelitian ini dapat di lanjutkan

untuk melihat bagaimana umpan balik kepemilikan modal politik seperti ini pada saat kandidat menjalankan pemerintahannya.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Persaingan politik yang intensitasnya besar dalam pemilu di Indonesia, disebabkan oleh sistem pemilu langsung yang diterapkan hingga saat ini. Sistem pemilihan umum langsung dimulai dengan terbukanya kesempatan bagi siapa pun untuk mencalonkan diri dalam pemilu, di lanjutkan dengan pemilih memilih langsung calon pilihannya, bukan lagi partai, pada yang terakhir inilah persaingan itu menjadi intens, dan modal politik menjadi faktor krusial dalam memenangkan pemilu, karena para calon berlomba-lomba meyakini pemilih untuk memilih mereka.

Pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010 tidak lepas dari keadaan diatas, pemilukada di kota wisata tersebut juga menerapkan sistem pemilihan langsung terhadap para calon walikota dan wakil walikota yang bersaing pada saat itu. Pada pemilukada kota Bukittinggi muncullah pemenangnya adalah pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, dimana dari hasil identifikasi awal, pasangan ini tidak mendominasi dari segi finansial diantara dua calon lain yaitu Zulkirwan Riva'I dan Ramlan Nurmatias, yang mempunyai kekayaan yang lebih besar daripada Ismet Amzis, ditambahkan lagi calon wakil walikota yang diusung juga kalah bersaing dari para calon wakil walikota lainnya yang berlatar belakang orang-orang yang berpengalaman dalam pemerintahan.

Kimberly L. Casey dalam "*Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*"⁴⁶, berusaha memberikan definisi terhadap modal politik. Modal politik Casey dikaitkan dengan berbagai interpretasi. Casey mendefinisikan modal politik dengan menggabungkan berbagai definisi modal yang telah ada untuk membentuk definisi empiris yang berbasis modal politik dan proses yang terkait. Interpretasi modal yang sangat mempengaruhinya adalah berasal dari sosiolog Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu berusaha memetaforakan modal yang

⁴⁶ Kimberly L Casey.2008. *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*. Paper Presented at the Illinois State University Conference for Students of Political Science. University of Missouri-St. Louis

terkait dengan dengan teori ekonomi (material) kepada non-ekonomi (pengejaran simbolik atau non-materi).

A. Optimalisasi Modal Politik

Hasil penjabaran dan analisis terkait identifikasi modal politik pasangan Ismet Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010 berlandaskan pada data-data yang didapatkan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010, maka selanjutnya akan di analisis bagaimana masing-masing modal tersebut menjadi optimal untuk kemenangan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

Konsep *ranah* dalam konsepsi *habitus*-nya Pierre Bouerdiaeu perlu kita singgung terlebih dahulu, untuk mengingatkan kembali bahwa dalam pemilukada yang dimaksudkan ranah adalah pemilukada itu sendiri, karena di dalam pemilukada itu terjadi perjuangan memperoleh posisi, yaitu posisi untuk menjadi walikota dan wakil walikota. Setelah itu konsep habitus, konsep ini berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara objektif⁴⁷, artinya habitus adalah konsep yang melihat kecenderungan yang sudah bersifat umum. Terkait dalam ranah pemilukada, yang juga berlangsung perjuangan posisi di dalamnya, terdapat praktek-praktek yang juga berlangsung secara umum, aktornya adalah para calon walikota dan wakil walikota yang ikut bertarung dalam pemilukada, bentuk praktek itu adalah bagaimana para calon selalu berupaya menarik simpatik pemilih dengan segala kepemilikan yang mereka punya. Praktek seperti ini menjadi berlaku umum dikarenakan sistem pemilu langsung yang melahirkan persaingan politik yang intens, dimana calon benar-benar harus mempunyai sumber daya modal yang mampu menunjang perjuangan posisi mereka di dalam ranah.

Untuk dapat mengkonstruksikan dan mereproduksi posisi-posisi mereka dan memperoleh posisi, maka Bourdieau telah mendeskripsikan dua tipe strategi untuk mempertimbangkan proses ini⁴⁸ :

⁴⁷ *Op.Cit.* Bagus Takwin. Hal. 26.

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 23.

- a. Tipe pertama, strategi reproduksi dilihat sebagai kumpulan praktik yang dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi.
- b. Tipe kedua, strategi penukaran (*reconversion*), berkorespondensi dengan pergerakan-pergerakan didalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi ; pertama, dalam hal bahwa keseluruhan jumlah modal adalah terstruktur dan, kedua, lewat perstruktur modal yang dominan dan terdominasi. Artinya, modal-modal yang tidak mendominasi bisa dipertukarkan dengan modal yang dominan, karena modal itu sendiri masing-masing modal adalah satu kejumlahan.

Dari dua tipe strategi tersebut artinya ada dua proses yang berbeda namun saling berhubungan timbal balik dalam melahirkan modal. Dari temuan-temuan mengenai modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi di atas, peneliti akan menganalisis optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi dengan kedua tipe strategi tersebut.

1. Strategi Reproduksi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi

Menganalisis kegiatan reproduksi modal berarti melihat bagaimana modal yang telah dimiliki dipertahankan dan ditingkatkan. Analisa ini beranjak dari temuan-temuan yang telah diperoleh dan dijabarkan satu persatu-satu.

1.1. Reproduksi Modal Lembaga

Sebagaimana temuan data di atas, pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi Tahun 2010 memiliki modal lembaga yang signifikan, ditandai dengan :

- a. Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi Tahun 2010 didukung oleh partai Demokrat sebagai pemenang pemilu Legislatif tahun 2009, dimana partai ini memperoleh 8 kursi dari 24 kursi yang diperebutkan. Fakta ini memperlihatkan bahwa pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi

didukung oleh partai yang sebelumnya telah melakukan usaha mempertahankan dan meningkatkan prestasi politik mereka di Bukittinggi.

b. Kedekatan kebijakan dan ideologi tercermin perbandingan visi dan misi antara partai Demokrat dengan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi. Proses reproduksi yang juga sangat jelas terlihat dari pasangan ini adalah diusungnya Harma Zaldi sebagai calon wakil walikota, dimana motifnya adalah berlandaskan pada visi dan misi, salah satu visi untuk menjadikan kota Bukittinggi sebagai kota kesehatan, dan Harma Zaldi di anggap bisa menopang terwujudnya visi dan misi ini. Alasan seperti ini mencerminkan bahwa ada sebuah usaha meningkatkan kesesuaian visi dan misi antara partai Demokrat dengan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

c. Indikator dukungan partai terhadap kandidat memanglah tidak sekuat dua indikator sebelumnya, *pertama*, keterkaderan kandidat dalam partai Demokrat, dimana Ismet Amzis dalam partai Demokrat tidaklah dinilai sebagai sosok kader yang loyal, disebabkan ia di angkat sebagai ketua DPC partai Demokrat Bukittinggi lebih di sebabkan karena kepentingan partai agar menang dalam pemilukada. Motivasi tersebut disebabkan dengan pertimbangan Ismet Amzis telah didukung dengan kuat sebelumnya oleh para tokoh masyarakat kota Bukittinggi untuk menjadi walikota Bukittinggi, namun peneliti menilai ini juga merupakan suatu bentuk reproduksi karena sekalipun Ismet Amzis bukanlah kader loyal, tetapi diangkatnya Ismet Amzis sebagai ketua DPC partai Demokrat Bukittinggi secara tersirat menggambarkan Ismet Amzis didukung dengan baik oleh partai Demokrat untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi partai dengan menang pada pemilukada. *Kedua*, dukungan keuangan dari internal partai tidak ada terhadap pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, yang terakhir ini tidak terjadi proses reproduksi.

d.

1.2. Reproduksi Modal Simbolik dan Modal Budaya

Sulit untuk menganalisis reproduksi kedua modal ini secara terpisah, Karena memang kedua modal ini saling mempengaruhinya sangat kuat. Melihat reproduksi modal simbolik berarti kita melihat bagaimana Ismet Amzis mereproduksi modal budayanya, karena proses reproduksi modal simbolik itu terjadi ketika bersinggungan modal budaya yang juga bereproduksi. Modal simbolik yang dimiliki pasangan Ismet

Amzis-Harma Zaldi tidak terlepas dari simbol *cadiak pandai* bagi orang *kurai* yang melekat kepada Ismet Amzis. Simbol ini dipertahankan oleh Ismet Amzis ketika peneliti menemukan bahwa dalam modal budayanya, Ismet Amzis mempertahankan dan meningkatkan perannya sebagai *cadiak pandai* Orang *kurai*, dengan terlibat dalam urusan-urusan adat dan juga menjabat sebagai sekretaris LKAAM Kota Bukittinggi.

1.3. Reproduksi Modal Sosial

Reproduksi modal sosial pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi prosesnya bersifat struktural, ketika pasangan ini didukung kuat oleh para tokoh masyarakat terutama tokoh adat penghulu *pucuk bulek* di kurai limo jorong. Proses struktural itu terbentuk dengan adanya sistem pemerintahan *bajanjang naiak, batanggo turun* yang dianut Kurai Limo Jorong, dimana kesepakatan itu diperoleh dengan seimbang, memperhatikan keinginan para penghulu pucuk bulek dan memperhatikan kehendak masyarakat kurai serta ketepatan-dayagunaan untuk masyarakat kurai. Transformasi hingga kebawah dilalui dengan adanya sifat peran dari para penghulu pucuk bulek yang dikenal dengan urek tunggang, artinya yang sudah menjadi kesepakatan para penghulu pucuk bulek, selanjutnya diteruskan oleh para pangka tuo kaum-kaum yang ada di kurai, pada tahap ini lah pandangan-pandangan penghulu pucuk bulek menyentuh masyarakat kurai. Namun, harus digarisbawahi bahwa, proses struktural ini tidak berlangsung secara konvensional, melainkan proses ini berjalan di bawah faktor kelaziman yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat kurai, disini terbukti bahwa dukungan individu membawa kepada dukungan kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat kurai.

Terhadap dukungan kelompok, reproduksi yang berlangsung adalah pendekatan yang dilakukan tim sukses terhadap kelompok-kelompok paguyuban dan agama di Bukittinggi. Proses ini menghasilkan dukungan kelompok yang tidak berbentuk formal, melainkan informal, dimana pendekatan secara organisatoris tidak terjadi, maksudnya pendekatan dan pengakuan kelompok itu hanya berbentuk kesadaran individual dari anggota-anggota kelompok, tidak tertulis, dan dukungan

seperti ini di dapat dari lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

1.4. Reproduksi Modal Moral

Modal moral pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi tercipta dalam bentuk keramahan dan kesederhanaan pasangan ini, dan bentuk reproduksinya adalah perilaku bermasyarakat yang dikedepankan. Kehadiran dalam berbagai acara takziah dan kenduri yang intens mampu menciptakan hubungan emosional antara Ismet Amzis dan Harma Zaldi dengan masyarakat.

Reproduksi yang sangat jelas terjadi pada pandangan moril mengenai kasus korupsi yang melibatkan mantan walikota Bukittinggi Djufri, yang mana pada saat itu Ismet Amzis menjabat sebagai wakil walikota, dan Djufri juga berasal dari partai yang sama dengan Ismet Amzis, yaitu partai Demokrat. Reproduksi yang terjadi berbentuk penyelamatan pandangan moril terkait opini masyarakat yang kuat pula terhadap kasus korupsi, yang hasilnya adalah opini moril masyarakat berbalik arah dengan malah mendukung pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi terkait dengan kasus korupsi mark-up tanah, atau lebih tepatnya disebut dengan penggiringan opini publik, namun itu tidak terlepas dari kondisi perkembangan kasus korupsi tersebut pada waktu itu.

1.5. Reproduksi Modal Manusia

Modal manusia yang paling melekat terhadap pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi adalah pengalaman pemerintahan yang sudah matang dari Ismet Amzis. Pengalaman pemerintahan ini juga didukung oleh pengalaman pelatihan yang berorientasi kepada peningkatan mutu sumber daya manusianya sebagai seseorang yang berkecimpung dalam pemerintahan. Peneliti melihat berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Ismet Amzis merupakan suatu bentuk reproduksi dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Ismet Amzis dalam pemerintahan. Tidak hanya itu saja Ismet Amzis berlatar belakang pendidikan hukum Tata Negara yang juga masih dalam bentuk meningkatkan daya kemampuannya dalam pemerintahan. Selain itu, pada tahun 2005

Ismet Amzis juga berpengalaman ikut dalam pemilu, walaupun pada saat itu hanya diusung sebagai calon wakil walikota berpasangan dengan Djufri, namun ketika Ismet Amzis mulai dilibatkan dalam organisasi partai Demokrat di Bukittinggi, yaitu sebagai ketua DPC partai Demokrat kota Bukittinggi, itu merupakan suatu bentuk reproduksi modal manusia Ismet Amzis terhadap indikator pengalaman politiknya.

1.6. Reproduksi Modal Ekonomi

Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada kota Bukittinggi tahun 2010 yang lalu memiliki pendanaan kampanye sebesar Rp. 331.300.000,-, sebanyak Rp. 73.000.000,- berasal dari donator. Tidak hanya dalam bentuk donasi keuangan seperti itu, pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi juga mengalami efisiensi pendanaan kampanye dengan banyaknya undangan yang datang dari masyarakat untuk mengadakan pertemuan dengan pasangan ini, yang akhirnya fasilitas pertemuan tersebut tidak ditanggulangi oleh pihak pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, melainkan partisipasi masyarakat yang mengundang. Hasilnya, dari Rp. 331.300.00,- total pemasukan dana kampanye pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, realisasi pemakaian dana ternyata adalah sebesar Rp. 227.800.000,-, artinya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi masih menyisakan sebanyak Rp. 103.500.000,- dana kampanyenya.

Proses reproduksi yang tergambar dari pembahasan diatas ternyata bukanlah mempertahankan dan meningkatkan jumlah dana kampanye oleh pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, melainkan gambaran sebuah manajemen keuangan yang berlandaskan kepada efisiensi penggunaan dana. Banyaknya undangan dari masyarakat untuk mengikuti pertemuan, sekaligus juga difasilitasi langsung oleh masyarakat yang mengundang berdampak kepada efisiensi tersebut, dan bentuk manajemen yang dilakukan tim adalah menyusun penjadwalan yang tidak pula melupakan pemanfaatan atas peluang melakukan efisiensi pendanaan tersebut.

2. Strategi Pertukaran (*reconversion*) Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi

Ada dua dimensi yang diperhatikan didalam strategi pertukaran (*reconversion*), *pertama* bahwa dalam hal keseluruhan modal adalah terstruktur, maksudnya adalah berbagai bentuk modal tidak berdiri sendiri, satu modal bisa muncul disebabkan modal lainnya, semua modal adalah sebuah kesatuan yang utuh. *Kedua*, penstrukturan modal yang dominan dan terdominasi, prosesnya adalah terdominasinya modal yang tidak mendominasi dikarenakan modal yang mendominasi, kembali kepada dimensi pertama, bahwasanya modal adalah satu kejumlahan. Atas pertimbangan dua dimensi ini, dianalisis bagaimana optimalisasi modal politik terjadi pada pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010.

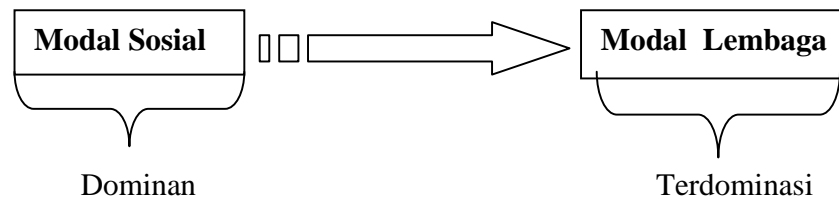
2.1.Strategi Pertukaran Modal Lembaga

Menganalisis pertukaran modal lembaga pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi berarti kita melihat alasan-alasan dibalik modal lembaga, dimana alasan-alasan itu sendiri adalah modal-modal lain yang terbesit didalam modal lembaga. Di bagian deskripsi temuan modal lembaga pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi dijelaskan bahwa modal lembaga pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi yaitu : partai Demokrat sebagai partai pemenang di Kota Bukittinggi dengan perolehan kursi sebanyak 8 kursi dari 24 kursi yang diperebutkan, kedekatan ideologi yang tercermin dari kesamaan motivasi dalam visi dan misi antara pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi dengan partai Demokrat, dan yang terakhir dipilihnya Ismet Amzis sebagai ketua DPC partai Demokrat, dengan pertimbangan kepentingan partai memenangkan pemilukada.

Pada indikator modal lembaga pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi yang terakhir inilah peneliti melihat terjadinya proses pertukaran modal. Dari temuan informasi yang telah dijabarkan sebelumnya, dikatakan bahwa Ismet Amzis sudah sejak pemilukada kota Bukittinggi tahun 2005 telah didorong oleh para tokoh masyarakat kota Bukittinggi, termasuk *penghulu pucuk bulek* Kurai Limo Jorong, untuk menjadi walikota Bukittinggi, dengan pertimbangan yang sangat kuat, dimana keinginan untuk adanya orang *kurai* kembali menjadi walikota di Bukittinggi. Peneliti melihat dengan dukungan yang terstruktur dari tokoh masyarakat, dipandang

potensial demi kepentingan partai Demokrat untuk memenangkan pemilu, sehingganya membutuhkan calon yang dianggap produktif. Jadi pertukaran yang modal yang terjadi disini adalah modal sosial yang terdominasi, mendominasi modal lembaga.

Gambar 5.1. Pertukaran Modal Lembaga Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi



Sumber : Konstruksi Peneliti

2.2. Strategi Pertukaran Modal Simbolik dan Modal Budaya

Menganalisis pertukaran modal terdominasi yang menjadikan modal simbolik modal yang mendominasi tidak berbeda seperti apa yang dilakukan dalam melihat pertukaran dalam modal lembaga, tetap melihat alasan-alasan yang terkandung didalam reproduksi modal simbolik dan modal budaya. Dalam konsepsi modal politik Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwasanya modal simbolik berkaitan erat dengan modal budaya, penjelasan ini memang tidak terbantahkan.

Berangkat dari temuan-temuan yang didapat berkaitan dengan modal simbolik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, dimana diatas telah dijabarkan bahwasanya simbol yang melekat dari seorang Ismet Amzis adalah *cadiak pandai* orang *kurai* bergelar Dt. Rajo Mangkuto. Pertama Ismet Amzis adalah orang *kurai*, dan kedua tidak hanya itu ia juga seorang *cadiak pandai*. Simbol seperti itu ia dapatkan dikarenakan oleh Ismet Amzis adalah orang yang lahir di Bukittinggi, apalagi bapak dan ibunya sama-sama orang *kurai*, dan symbol sebagai *cadiak pandai* didapat peran yang selama ini ia lakukan, informasi yang diperoleh, terlibat sebagai sekretaris LKAAM sudah mencerminkan ia adalah seorang *cadiak pandai*.

Sifat peran *datang dahulu, pulang kudian*, mencerminkan bahwa sebagai *cadiak pandai* ia melaksanakan perannya berdasarkan pada sumber daya manusia

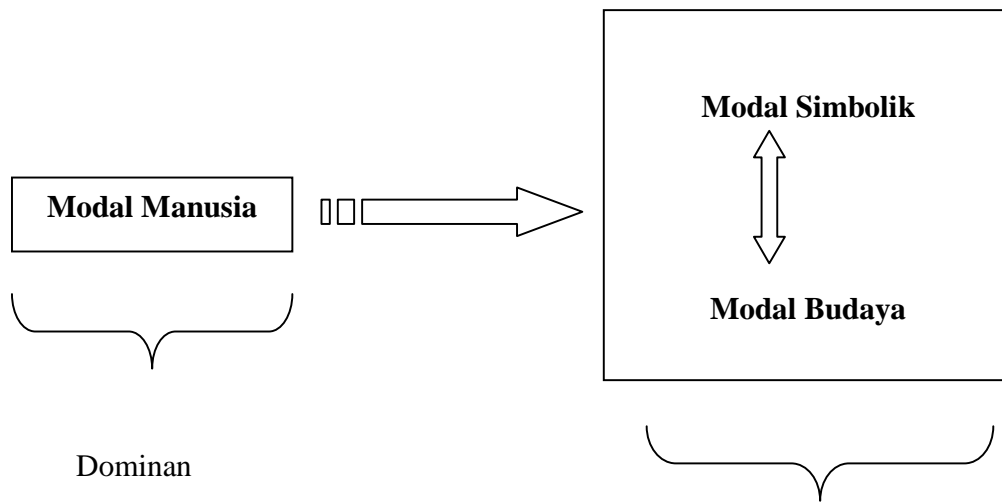
yang dimilikinya. Seorang *cadiak pandai* tugasnya bukanlah mengurus anak kemenakan, melainkan membantu *pangka tuo* terkait peran *pangka tuo* mengurus anak kemenakan. Bentuk pembantuan itu bisa berbentuk terlibat dalam kepengurusan lembaga yang mengurus urusan adat. Ketika peran sebagai *cadiak pandai* itu ternyata memperhatikan sumber daya manusia aktornya, berarti terkait dengan modal simbolik ini menyusup modal manusia sebagai modal terdominasi, artinya untuk mendapatkan simbol sebagai *cadiak pandai*, didapat berdasarkan kepemilikan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk seorang *cadiak pandai*.

Tidak hanya sampai disitu saja, berdasarkan hasil analisis reproduksi antara modal simbolik dan modal budaya, terdapat proses tersendiri antara kedua modal ini dalam proses pertukaran, dimana pertukaran yang terjadi antara kedua modal ini tidak antara modal terdominasi dengan mendominasi, melainkan proses yang bersinggungan, di analogikan seperti dua sisi mata uang, kedua modal ini adalah sebuah kesatuan utuh tapi berbeda dari segi bentuk modalnya.

Dari temuan berkaitan dengan modal simbolik dan modal budaya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, simbol sebagai *cadiak pandai* orang *kurai* merupakan modal simboliknya, selanjutnya yang menjadi modal budayanya adalah bagaimana modal simbolik itu dijalankan, sehingga mampu menjadi aktor yang berpengaruh di lingkungannya. Ismet Amzis dari temuan data, dijelaskan menjalankan perannya sebagai *cadiak pandai* dengan pernah terlibat sebagai sekretaris LKAAM kota Bukittinggi dan juga ikut membantu berbagai kegiatan-kegiatan adat. Dari informasi ini, terlihat bahwa Ismet Amzis walaupun gelar Dt. Mangkuto sebagai *cadiak pandai* itu didapat dari kaumnya, tetapi ia bisa merealisasikannya juga untuk masyarakat kota Bukittinggi dengan terlibat sebagai sekretaris LKAAM kota Bukittinggi.

Maka tampaklah bagaimana bentuk pertukaran yang terjadi pada modal simbolik dan modal budaya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilu pada kota Bukittinggi tahun 2010, modal manusia adalah sebagai modal terdominasi yang mendominasi modal simbolik dan modal budaya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

Gambar 5.2. Pertukaran Modal Simbolik dan Modal Budaya Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi



Sumber :

Konstruksi Peneliti

Terdominasi

2.3. Strategi Pertukaran Modal Sosial

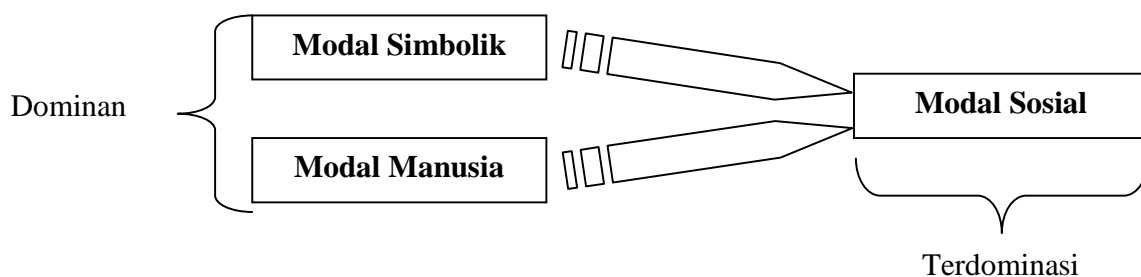
Modal sosial memiliki tiga indikator untuk dijadikan perhatian dalam menganalisis modal ini, yaitu dukungan individu, dukungan kolektif dan keterkenalan nama. Dari temuan dan analisis reproduksi modal sosial pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi dijelaskan nampaklah yang menjadi kekuatan besar dari modal social pasangan ini adalah dukungan individu dan keterkenalan nama. Tidak mengenyampingkan indikator kelompok kolektif yang dimiliki oleh pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, tetapi pengaruh dukungan individu terlihat besar terhadap pasangan ini, dan dukungan individu itu sendiri menurut Lin dalam konsepsi modal politik Kimberly L. Casey dukungan individu membawa kepada dukungan kolektif.

Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi didukung kuat oleh para tokoh masyarakat kota Bukittinggi, juga termasuk didukung langsung oleh *penghulu pucuk bulek* Kurai Limo Jorong. Dukungan ini tidak dimulai ketika Ismet Amzis

maju menjadi calon walikota Bukittinggi pada pilkada tahun 2010, melainkan sudah dimulai didorong untuk menjadi calon walikota pada Pilkada kota Bukittinggi tahun 2005. Artinya, jauh sebelum pilkada kota Bukittinggi tahun 2010, Ismet Amzis sudah dikenal. Pertimbangan para tokoh masyarakat untuk mendukung Ismet Amzis sedari awalnya adalah karena Ismet Amzis adalah orang *kurai*, dan motivasi yang besar dari para tokoh masyarakat agar munculnya kembali orang *kurai* yang menjadi walikota di Bukittinggi mengarah harapan kepada Ismet Amzis. Tidak hanya karena faktor ke-*kurai*-an yang dimiliki oleh Ismet Amzis, dibandingkan dengan Ramlan Nurmatias dan Zulkirwan Riva'I yang juga sama-sama orang *kurai*, dukungan tersebut mempertimbangkan faktor pengalaman yang dimiliki oleh Ismet Amzis. Berkecimpung dalam bidang pemerintah yang sudah matang, menjadikan para tokoh masyarakat yang berpengaruh di Bukittinggi menguatkan diri mendukung pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

Peneliti menganalisis berdasarkan penjelasan di atas, munculah gambaran pertukaran yang terjadi terhadap modal sosial yang dimiliki oleh pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi. Ke-*kurai*-an Ismet Amzis merupakan modal simbolik yang dimiliki pasangan ini, dan pengalaman seperti yang telah disinggung sebelumnya merupakan modal manusia yang dimiliki oleh pasangan ini, artinya ada dua modal terdominasi yang mendominasi modal sosialnya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, modal simbolik dan modal manusia.

Gambar 5.3. Pertukaran Modal Sosial pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi



Sumber : Konstruksi Peneliti

2.4. Strategi Pertukaran Modal Manusia

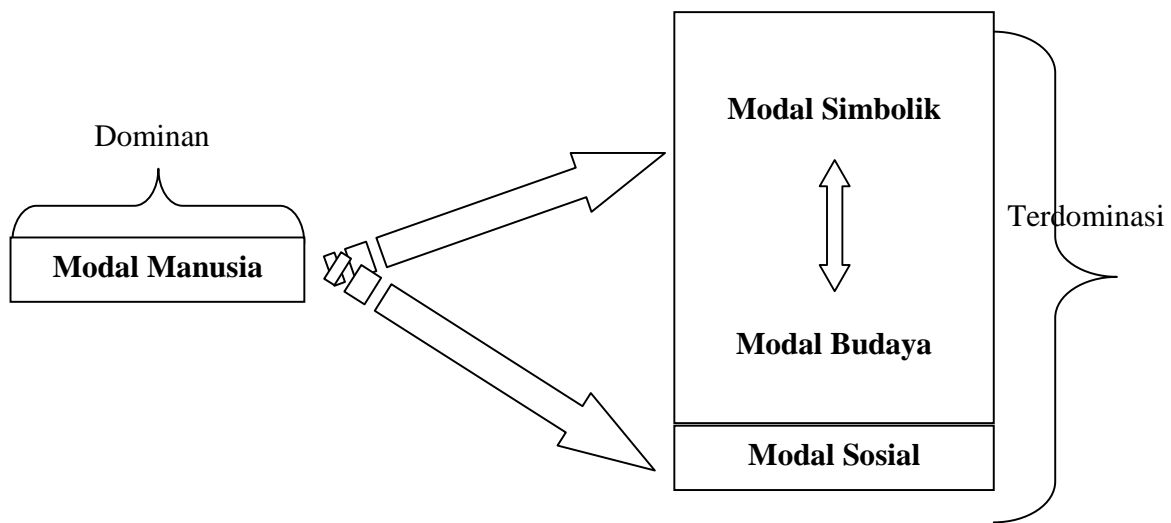
Hasil analisa reproduksi modal manusia pasangan Ismet Amzis adalah dalam mempertahankan dan meningkatkan pengalamannya dalam bidang pemerintahan, Ismet Amzis banyak mengikuti diklat-diklat yang berkenaan dengan pemerintahan, bahkan terakhir ia mengikuti diklat Lemhanas di Jakarta, dan masih banyak lagi diklat-diklat pengembangan sumber daya pemerintahan yang ia ikuti selama ia berprofesi sebagai PNS hingga terakhir menjadi wakil walikota. Temuan tersebut mengindikasikan proses reproduksi pada modal manusia tidak diikuti dengan pengaruh modal lain, disebabkan proses reproduksi yang berlangsung di dalam modal manusia, berjalan dengan sendiri.

Indikator dalam melihat modal manusia adalah pertama kemampuan dalam mengambil kebijakan, pengalaman yang sudah puluhan tahun dalam pemerintahan, ditambah lagi menduduki berbagai jabatan hingga menjadi sekdako Sawahlunto dan terakhir menjadi wakil walikota, merupakan sebuah proses berkala, tidak ada modal lain yang terdominasi yang menjadikan indikator ini mendominasi. Indikator kedua yaitu pengalaman politik. Ismet Amzis pada tahun 2005 pernah mengikuti kompetensi politik. Peneliti berpendapat, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh yang telah dijabarkan di atas, Ismet Amzis sudah lama didukung untuk menjadi walikota di Bukittinggi, dengan pertimbangan ia adalah orang *kurai* ditambah pengalaman yang sudah lama di pemerintahan, maka tetap saja indikator ini dipengaruhi oleh pengalaman Ismet Amzis dalam pemerintahan. Indikator ketiga adalah pengalaman pelatihan pengembangan sumber daya manusia, indikator ini bereproduksi disebabkan oleh tuntutan terhadap Ismet Amzis berkaitan dengan profesinya sebagai PNS. terakhir indikator keempat yaitu pendidikan, bidang pendidikan Tata Negara yang pernah dilalui Ismet Amzis merupakan reproduksi yang tidak langsung mempertahankan dan meningkatkan modal manusianya.

Dari jabaran diatas, tampaklah bahwa modal manusia tidak dipengaruhi modal terdominasi yang lain, artinya modal manusia adalah modal yang berdiri sendiri, bereproduksi sendiri tanpa dijadikan mendominasi oleh modal lain. tidak ditemukan proses afiltrasi modal lain kedalam modal manusia, jadi peneliti berpendapat bahwa

modal manusia adalah modal terdominasi tunggal. Modal manusia dalam pertukaran malah menjadi modal terdominasi yang mendominasi modal-modal lainnya seperti yang telah dijabarak diatas, yaitu mendominasi modal simbolik, modal budaya dan modal sosial pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, maka dalam analisa berkitan dengan pertukaran modal manusia, pertukaran yang terjadi adalah modal manusia menjadi modal dominan yang mendominasi modal simbolik, modal budaya dan modal sosial.

Gambar 5.4. Pertukaran Modal Manusia Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi



Sumber : Konstruksi Peneliti

2.5. Strategi Pertukaran Modal Moral

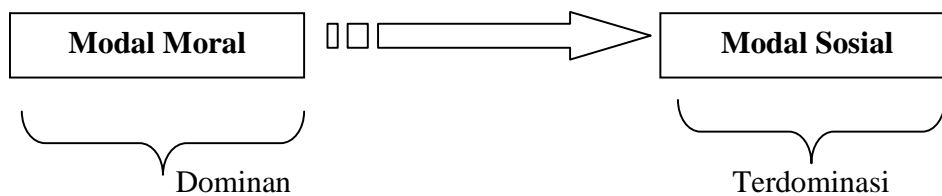
Modal moral mempunyai ciri khas tersendiri juga seperti modal manusia, dilihat dari hasil analisis pada strategi reproduksi modal moral, modal moral juga tidak mendapatkan proses pertukaran dari modal lain yan dominan, melainkan modal moral ini menjadi modal dominan yang mendominasi modal sosial, karena moral yang berkesesuaian dengan standar moral atau landasan moral yang disebutkan oleh Kane dalam konsepsi modal politik Kimberly L. Casey pada pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi berdampak kepada dukungan terhadap pasangan ini.

Keramahan dan kesederhanaan yang dikedepankan dalam bermasyarakat oleh pasangan ini, keterbukaan diri menghadiri acara-acara yang menumbuhkan

hubungan emosional dengan masyarakat, dan opini publik yang berdampak positif terhadap pasangan Ismet Amzis terkait kasus mark-up tanah melahirkan dukungan.

Seperti modal manusia, modal moral peneliti nilai sebagai modal dominan tunggal, proses terdominasinya tidak ada input dari modal lain yang dominan, melainkan modal moral ini menjadi modal dominan yang mendominasi modal lain, yaitu modal sosial.

Gambar 5.5. Pertukaran Modal Moral Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi



Sumber : Konstruksi Peneliti

2.6. Strategi Pertukaran Modal Ekonomi

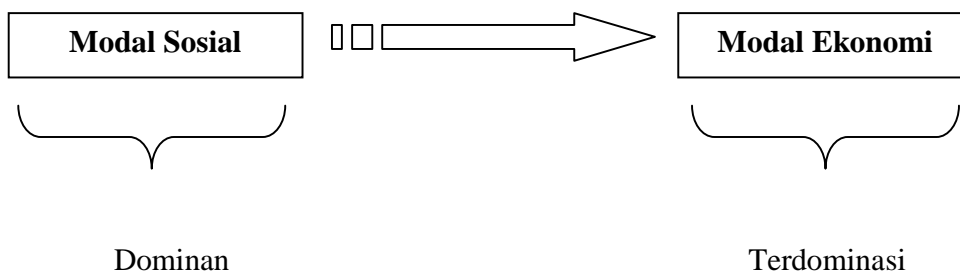
Modal ekonomi dalam konsepsi modal politik Kimberly L. Casey yang diperhatikan adalah total keuangan yang dimiliki oleh kandidat dalam pemilu. Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi dari data laporan penerimaan dana kampanye yang di audit oleh Anton Silalahi (public accountants) yang diserahkan ke KPUD Kota Bukittinggi, total penerimaan dana kampanye pasangan ini adalah Rp.331.000.000,-, dimana dari keseluruhan total tersebut sebanyak Rp. 73.000.000,- diperoleh dari sumbangan perseorangan terhadap pasangan ini.

Proses reproduksi modal ekonomi pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada kota Bukittinggi tahun 2010 terjadi dalam dua bentuk, pertama, adanya dukungan pendanaan dari individu-individu terhadap pasangan ini, kedua, adanya proses efisiensi pendanaan yang disebabkan banyaknya undangan yang datang dari masyarakat bersifat partisipatif terhadap pasangan ini. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah menyediakan fasilitas pertemuan tatap muka antara calon dengan para

masyarakat, sehingga pengeluaran tim terhadap penggiringan massa bisa diminimalisir begitu juga dengan distribusi materi kampanye, bahkan dana kampanye yang dimiliki oleh pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilu kota Bukittinggi tahun 2010 bersisa sebanyak Rp. 103.500.000,-, membuktikan telah terjadi efisiensi pendanaan yang baik.

Kedua bentuk reproduksi tersebut peneliti melihat merupakan hasil dari dominasi modal sosial yang hingga menyebabkan modal ekonomi pun terdominasi. Dua indikator modal sosial tersirat didalam analisa reproduksi modal ekonomi pasangan Ismet Amzis-harma Zaldi, yaitu dukungan individu yang berbentuk sumbangan perseorangan terhadap pendanaan kampanye pasangan ini, dan dukungan kelompok masyarakat, yang menyediakan fasilitas pertemuan calon dengan masyarakat, sehingga meminimalisir pendanaan dalam bentuk menggiring massa dan distribusi materi kampanye pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi. Jadi pertukaran yang terjadi dalam modal ekonomi adalah modal sosial yang dominan menjadikan modal ekonomi terdominasi.

Gambar 5.6. Pertukaran Modal Ekonomi Pasangan Ismet Amzis-harma Zaldi



Sumber : Konstruksi Peneliti

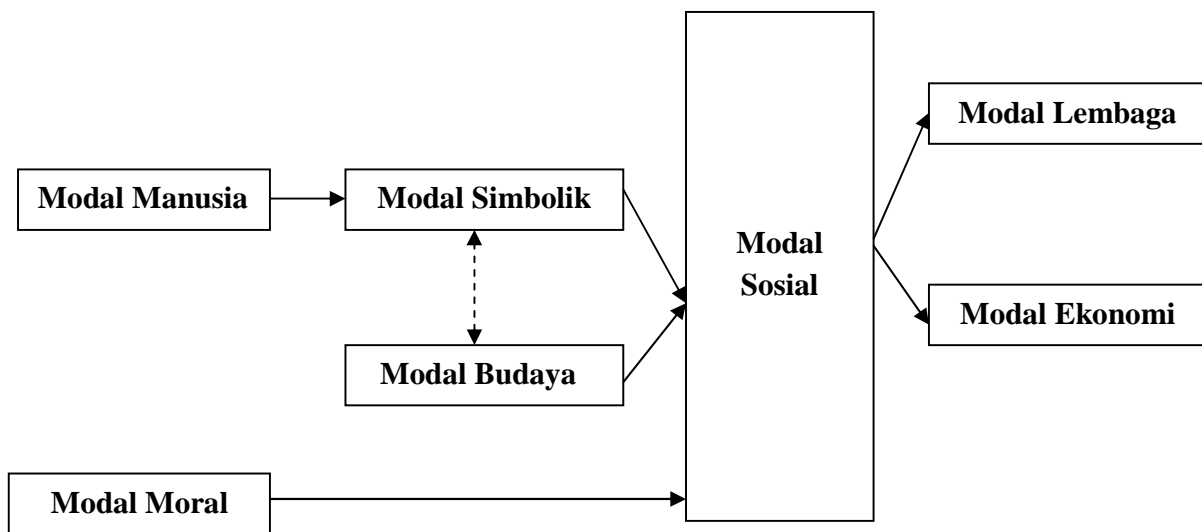
B. Proses Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi

Sifat modal yang terstruktur seperti yang dikatakan Pierre Bourdieu menjadikan peneliti berusaha untuk menganalisa sampai pada bentuk umum struktur optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilu kota Bukittinggi tahun 2010, dibuktikan jika didalami dengan baik hasil analisis

terhadap reproduksi hingga pertukaran modal yang terjadi terhadap pasangan ini, kita akan sampai pada bentuk umum atas keseluruhan modal tersebut.

Modal manusia dan modal moral dari hasil analisa reproduksi dan pertukaran yang terjadi, kedua modal ini peneliti anggap sebagai modal dasar yang membangun bangunan modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi. Karakter kedua modal ini yang berdiri sendiri, tidak memperoleh input dari modal lain, dan malah memberikan input kepada beberapa modal, inilah yang menjadikan argumen peneliti bahwasanya kedua modal ini dijadikan dua modal dasar dalam bangunan modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010. Seperti tergambar didalam bagan dibawah ini :

Gambar 5.7. Proses Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.



Sumber : Konstruksi Peneliti

Dari bagan diatas, dijelaskan bahwa dalam optimalisasi yang terjadi, modal dasar pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi adalah modal manusia dan modal moral. Dari kedua modal ini yang paling dominan memberikan dampaknya adalah modal manusia, karena dalam berbagai informasi yang telah di analisa sebelumnya

pengalaman dalam bidang pemerintahan Ismet Amzis menjadi perhatian khusus. Sebelum sampai pada pengalaman bidang pemerintahan, modal manusia memberikan pengaruh kepada modal simbolik, karena Ismet Amzis mempunyai simbol sebagai *cadiak pandai* bagi orang *kurai*, dua indikator modal manusia inilah yang membedakan Ismet Amzis dengan para calon walikota lainnya, khusus dengan calon walikota yang juga sama-sama orang *kurai*, pengalaman yang mendukung indikator kemampuan menjadi faktor dominan terhadap pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

Modal simbolik dan modal budaya mempunyai proses tersendiri antara keduanya, berbeda dengan modal-modal lainnya. Kedua modal ini merupakan satu kesatuan yang bersinergi dengan utuh, tidak dinamis, dikarenakan modal simbolik diperoleh dari budaya dominan yang melahirkan simbol, sedangkan modal budaya ukurannya aktor dalam menjalankan simbol dalam lingkungan sosialnya, sehingga dengan predikat simbolik yang dijalankan, maka pengaruh didapatkan oleh aktor, yang akhirnya menjadi modal budaya. Ismet Amzis dengan simbol sebagai *cadiak pandai*, tidak hanya kaumnya melainkan juga masyarakat Bukittinggi, dari temuan yang telah dijabarkan bahwa ia menjalankan simbol yang melekat dalam dirinya dengan pernah terlibat sebagai sekretaris LKAAM kota Bukittinggi dan juga terlibat pembantuan-pembantuan kegiatan adat.

Selanjutnya, modal simbolik dan modal budaya ini mengoptimalkan modal sosial terhadap pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi. Dari temuan, dijelaskan bahwa besarnya dukungan tokoh masyarakat dan keterkenalan nama Ismet Amzis tidak dimulai ketika Ismet Amzis mencalonkan diri menjadi walikota Bukittinggi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010, melainkan sudah semenjak pilkada kota Bukittinggi tahun 2005, dimana ia didorong untuk menjadi calon walikota Bukittinggi pada masa itu. Modal sosial tidak hanya teroptimalkan dengan modal simbolik dan modal yang telah dimiliki oleh pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi, melainkan juga karena modal moral yang dimiliki pasangan ini.

Setelah modal sosial teroptimalkan, ternyata memberikan dampak pada teroptimalkannya juga modal lembaga dan modal ekonomi. Terhadap modal lembaga, perhatian khusus muncul kepada indikator dukungan partai Demokrat

terhadap pasangan Ismet Amzis, analisa peneliti sebelumnya telah menjelaskan bahwa dipilihnya Ismet Amzis sebagai ketua DPC semata dikarenakan kepentingan partai Demokrat memenangkan pemilukada, alasan ini beranjak dari informasi yang diberikan informan ditambah dengan modal sosial yang telah dimiliki oleh Ismet Amzis semenjak pilkada kota Bukittinggi tahun 2005. Modal ekonomi pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi teroptimalkan karena dukungan modal sosial, konkritnya dua indikator modal sosial memberikan optimalisasi kepada modal ekonomi pasangan ini, yaitu dukungan individu, terbukti dengan adanya donasi keuangan dari beberapa orang individu terhadap pasangan ini, kedua dukungan kelompok, dimana lahirnya partisipasi masyarakat terhadap kampanye pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi membuat pasangan ini melakukan efisiensi pendanaan yang baik, bahkan bisa bersisa pendanaan kampanye.

C. Pengorganisasian Konsep Habitus pada Analisa Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi

Sampai pada analisa terakhir sebelumnya, peneliti dapat melanjutkannya kepada analisa pengorganisasian konsep habitus pada kasus kandidat pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010, yang telah diidentifikasi dengan konsep modal politik yang dijabarkan oleh Kimberly L. Casey. Beranjak dari penjelasan yang diberikan oleh Bagus Takwin tentang relasi habitus dengan ranah, dengan modal sampai relasi-relasi ini menghasilkan praktik, bahwa praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah, dan ranah yang juga produk sejarah. Pada saat bersamaan, habitus dan ranah juga merupakan produk dari medan-medan dari daya-daya yang ada di masyarakat. Dalam suatu ranah ada pertarungan kekuatan-kekuatan serta orang yang memiliki modal. Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan, sesuatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya.

Sebelum sampai pada pengorganisasian untuk analisa kasus, baiknya digambarkan terlebih dahulu posisi konsepsi modal politik Kimberly L. Casey dalam tatanan relasi-relasi yang dijelaskan oleh Bagus Takwin. Penjelasan yang di berikan

oleh Bagus Takwin tidak terlepas dari formula Pierre Bourdieu yang sudah terkenal di kalangan ilmuwan sosial yaitu $(Habitus \times Modal) + Ranah = Praktik$. Dalam formula tersebut modal yang dikatakan Bourdieu bisa di tempati oleh konsepsi modal politiknya Kimberly L. Casey, karena sebagaimana peneliti jabarkan pada Bab II bahwa konsepsi modal Casey di dasarkan pada konsep modalnya Pierre Bourdieu, namun Casey bisa lebih menurunkannya kepada bentuk-bentuk modal yang spesifik, dan peneliti dengan kepentingan analisa yang mendalam, lebih memilih menggunakan konsepsi modal politiknya Casey.

Merujuk kepada hasil analisa kasus, bahwasanya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi ternyata lebih diuntungkan dengan modal simbolik dan modal budaya yang di miliki, dan kedua modal ini di dasarkan kepada modal manusia yang di miliki oleh Ismet Amzis, sehingganya modal sosialnya menjadi teroptimalkan selain juga di kontribusikan oleh modal moral. Modal sosial yang sudah di miliki oleh pasangan ini akhirnya mampu mengoptimalkan modal lembaga dan modal ekonomi.

Dari hasil temuan data, proses optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi ini merupakan penyesuaian atas habitus ranah pemilukada kota Bukittinggi tahun 2010, dimana habitusnya adalah berkembangnya wacana walikota berasal dari orang *kurai*, sehingga ini menjadi tuntutan *trend* yang harus di ikuti oleh para kandidat, atau suatu bentuk penyesuaian yang harusnya di capai oleh para calon walikota dan wakil walikota Bukittinggi pada pemilukada tahun 2010. Analisa ini di dasarkan pada definisi habitus yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu yang mengatakan bahwa habitus berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif⁴⁹, yang menjadi basis generatif dari pemilukada kota Bukittinggi tahun 2010 itu adalah berkembangnya wacana keinginan para tokoh masyarakat walikota Bukittinggi berasal dari orang *kurai*. Habitus menurut Bagus Takwin, mengimplikasikan suatu penyesuaian subjektif

⁴⁹ Bagus Takwin. 2009. $(Habitus \times Modal) + Ranah = Praktik$ (Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu). Yogyakarta: Jalasutra. Hal 13

posisi sosial di dalam ranah⁵⁰, penjelasan ini di gambarkan dengan adanya proses optimalisasi modal politik yang di lakukan pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi.

⁵⁰ Ibid, Hal 13

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai upaya analisis yang telah peneliti paparkan pada bab V, maka peneliti telah dapat membuat kesimpulan yang merupakan penegasan umum dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

Optimalisasi modal politik pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi didasarkan pada modal manusia dan modal moral yang dimiliki oleh Ismet Amzis. Kedua modal ini memberikan dampak langsung kepada modal sosial pasangan ini, namun secara khusus modal manusia memberikan optimalisasi terlebih dahulu terhadap modal simbolik dan modal budaya pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada kota Bukittinggi tahun 2010

Modal sosial yang seperti itu memberikan efek terdominasi pula kepada modal lembaga dan modal ekonomi pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010. Proses seperti itu terjadi ketika adanya pertimbangan partai demokrat terhadap modal sosial yang tercipta dari Ismet Amzis. Selanjutnya modal ekonomi menjadi optimal, dari modal sosial yang muncul donator dan kegiatan yang sifatnya partisipatif dari masyarakat dalam kegiatan kampanye pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada Pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010.

B. Saran.

- a. Memperhatikan modal politik terlebih dahulu terbukti penting untuk setiap kandidat yang ingin berkompetensi dalam persaingan politik.
- b. Setiap kandidat hendaknya tidak berorientasi kepada modal ekonomi semata, karena terbukti pengaruh dibangun dari simbol yang dinilai akan berdampak positif terhadap peran politik yang akan di emban.
- c. Penelitian ini hendaknya menjadi referensi bagi para politisi, bagaimana membangun kepercayaan dengan kepemilikan modal politik yang baik,

tidak hanya semata kepada cara-cara konvensional yang memakan keuangan yang banyak, sehingga bisa terbebas dari politik transaksional.

- d. Penelitian ini baru sampai pada tahap menganalisis optimalisasi modal politik, untuk penelitian lanjutan, hendaknya peneliti selanjutnya bisa mencapai pada analisis umpan balik terhadap optimalisasi modal politik yang terjadi, rentetan waktunya pada saat kandidat yang menang menjalankan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Birner, Regina and Wittmer, Heidi. *Covertng Social Capital into Political Capital. How do local communities gain political influence? A theoritical approach and empirical evidence from Tahiland and Columbia*. Paper submitted to the 8th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP). (tanpa tahun)
- Booth, John A and Richard, Patricia Bayer. 1997. *Civil Society, Political Capital, and Democratization In Central America*. Prepared for presentation at the XXO International Congress of The Latin American Studies Association, Guadalajara, Mexico.
- Bourdieu, Pierre and Wacqu, Loic J.D. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Polity Press. The University of Chicago.
- Bungin, Burhan. 2003. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*". Jakarta: Raja Garfindo Persada
- Casey, Kimberly L. 2008. *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu' Interconvertibility Theory*. University of Missouri. St. Louis.
- Faisal, Sanapiah.1990. "*Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*".Malang: YA.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maleong, Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*".PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieau*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Lingkaran Survei Indonesia. 2007. *Incumbent dan Pilkada*. Edisi 02 Juni.
- Marijan, Kacung. 2007. *Pilkada Langsung : Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*. Disampaikan pada "In-House Discussion Dialog Komunikasi Partai Politik" yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). Jakarta 16 November 2007.
- Mujani, Saiful dan Lidle, William L. 2010. Personalities, Paties and Voters. *Journal of Democracy* Volume 21, number 2 april 2010. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Nasution, S. 1992. "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*". Bandung : Transiti
- Nursal, Adnan. 2004. *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu. Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : Gramedia Pusataka Utama.

Takwin, Bagus. 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu)*. Yogyakarta: Jalasutra

Yin. Robert K. 2002. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.